



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KECAMATAN LEWOLEMA
(Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan
Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

YOHANES IBI HURINT

NIM: 018397393

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRAKSI

Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)

Yohanes Ibi Hurint

Universitas Terbuka

gauljulio@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di desa Sinar Hading dan Desa Balukhering. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai hasil jangka menengah kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan. Disamping itu penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan sebuah program dan merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tujuan jangka menengah program yaitu mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha dan ataupun sosial dasar dapat tercapai dengan baik yang ditandai dengan peningkatan usaha anggota kelompok dan terpenuhinya kebutuhan sosial dasar mereka. Evaluasi terhadap memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dinilai berhasil yang ditandai dengan peningkatan usaha ekonomi rumah tangga. Terhadap penguatan kelembagaan simpan pinjam kelompok Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan tidak tercapai. Untuk itu diharapkan pelaku program dapat memanfaatkan faktor pendukung dan meminimalisir faktor penghambat yang ada sehingga pelaksanaan Simpan Pinjam untuk Kelompok dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Kelompok perempuan, Simpan pinjam dan Pendampingan.

ABSTRACT**Evaluation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in District Lewolema (Case Study Savings and Loan Activity For Women's Group in the Village Sinar Hading and the Village Balukhering)**

Yohanes Ibi Hurint
The Open University
gauljulio@gmail.com

This study aimed to evaluate the implementation of the National Program for Community Empowerment in Rural Areas in particular on the activities of Group Savings and Loans to Women in the village Sinar Hading and the village Balukhering. This evaluation aims to assess the medium-term results of activities for Group Women's Savings and Loans in accordance with the objectives that are planned in the National Program for Community Empowerment in Rural Areas ie Accelerate the process of meeting the needs of business or social funding base , giving women the opportunity to improve the household economy through capital funding institutional strengthening efforts and encourage savings and loans by women . Besides, this study aims to look at and describe the factors supporting and inhibiting factors in the implementation of savings and loans to groups of women.

The approach used in this study used a qualitative approach with descriptive design which illustrates the fact that occur as a result of the implementation of the program subuah and applied research in the form of an evaluative research.

The results illustrate that the medium-term goal of the program is accelerating the process of fulfillment or social venture funding and base can be achieved with a well characterized by increased member business group and the fulfillment of their basic social needs . Evaluation of providing opportunities for women to improve household economy through venture capital funding was considered successful which is characterized by an increase in household economic enterprises . Towards institutional strengthening Savings and Loan savings and loan group for women's group is not reached . The actor is expected to be able to take advantage of programs supporting factors and minimize disincentives that exist so that the implementation of the Group Savings and Loans to be implemented as expected.

Keywords : Evaluation Program , Women's group , Save borrow and Mentoring

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)

Penyusun TAPM : Yohanes Ibi Hurint

NIM : 018397393

Program Studi : Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu / 13 Oktober 2013


Waktu : 14.30 – 16.30 Wita

Menyetujui :

Pembimbing II,



Dr. Gora Yohannes, M.S

Pembimbing I,



Dr. Frans Gana, M.Si
NIP.19600614 198702 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,


Florentina Ratih Wulandari, S.IP, M.Si
NIP.19710609 19980 2 001

Direktur Program Pascasarjana


Suclafi, MSc, Ph.D
NIP.19520313 198503 2 001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Yohanes Ibi Hurint
NIM : 018397393
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
*Perdesaan di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan
Pinjam Untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa
Balukhering)*

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Pasca Sarjana Program Studi
Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada

Hari : Minggu, 13 Oktober 2013

Waktu : 14.30 – 16.30 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Suciati, M.Sc, Ph.D

Panguji Ahli : Prof.Dr. Sangkala

Pembimbing I : Dr. Frans Gana, M.Si

Pembimbing II : Dr.Goru Yohannes M.S

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM Yang Berjudul

**EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN LEWOLEMA**
(Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan
Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhoring)

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan benar,
apabila dikemudian hari ternyata ditemukan
adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia
menerima sanksi akademik.

Larantuka, Agustus 2013

tatakan,

YOHANES IBI HURINT

NIM. 018397393

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul : Evaluasi Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukherin) telah diselesaikan. Dalam penulisan tesis ini penulis mengambil fokus penelitian mengevaluasi Pelaksanaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukherin yang bertujuan untuk menilai hasil tujuan jangka menengah kegiatan simpan pinjam perempuan sesuai dengan rencana program PNPM tersebut.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Maka pada kesempatan ini ijin penulis menyampaikan limpah terima kasih pada :

1. Bapak Drs. R Alam Malau, MSi selaku Kepala UPBJ-UT Kupang yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
2. Bapak Dr. Frans Gana, MSi selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing penulis sehingga tesis ini terselesaikan;
3. Bapak Dr. Goru Yohannes, MSi selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing penulis sehingga tesis ini terselesaikan;
4. Bapak prof. Dr. Sangkala selaku Penguji Ahli yang telah memberikan saran dalam penulisan tesis ini
5. Ibu Suciati, MSc,Ph.D sebagai Ketua Komisi Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan tesis ini

6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka Kupang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan sehingga tesis ini terselesaikan;
7. Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan studi dan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
8. Istri dan Anak-anakku yang terkasih yang telah memberikan dukungan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Kupang, September 2013

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIHAN TESIS	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Analisis Kebijakan Publik	20
B. Evaluasi Kebijakan Publik	25
C. Evaluasi Program	30
D. Penelitian Sebelumnya	33
E. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan penelitian dan Jenis Penelitian	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Teknik Pemilihan Informan	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisa Data	47
F. Teknik untuk Meningkatkan Kualitas Penelitian	48

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A.	Gambaran Program dan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan	50
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	78
C.	Pelaksanaan kegiatan SPP	81
D.	Profil Usaha Kelompok SPP	86
E.	Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Kegiatan SPP	92
F.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan SPP	118
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	130
A.	Simpulan	130
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN		

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Indikator Perkembangan Kelompok SPP	70
2. Tabel 4.2 Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin	79
3. Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Miskin	80
4. Tabel 4.4 Data Kelompok SPP, Besarnya Pinjaman dan Realisasi Pinjaman Kelompok SPP Desa Balukherin	84
5. Tabel 4.5. Data Kelompok SPP, Besarnya Pinjaman dan Realisasi Pinjaman Kelompok SPP Desa Sinar Hading	85
6. Tabel 4.6 Perkembangan Usaha dan Kondisi Sosial Dasar Anggota Kelompok SPP Desa Balukherin	111
7. Tabel 4.7 Perkembangan Usaha dan Kondisi Sosial Dasar Anggota Kelompok SPP Desa Sinar Hading	112

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 2.1. Model Kebijakan Publik Sebagai Sistem Nilai	12
2.	Gambar 2.2. Model Pemahaman Kebijakan Publik	14
3.	Gambar 2.3. Pengembangan Pemahaman Kebijakan Publik	15
4.	Gambar 3.1 Model Perencanaan Kegiatan SPP	41
5.	Gambar 4.1. Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK	75
6.	Gambar 4.2 Wawancara dengan Kades Desa Balukherin	81
7.	Gambar 4.3 Musyawarah Khusus Perempuan	83
8.	Gambar 4.4 Kios Milik KSR	87
9.	Gambar 4.5 Wawancara dengan Ibu ABP	89
10.	Gambar 4.6. Usaha Suami AYR	89
11.	Gambar 4.7 Kelompok Tenun Ikat Ibu Kota	90
12.	Gambar 4.8 Ternak Babi Ibu AR	91
13.	Gambar 4.9 Kios Ibu SMW	97
14.	Gambar 4.10 Wawancara dengan Ibu APK	98
15.	Gambar 4.11 Kelompok Tenun Ikat Ibu Kota	100
16.	Gambar 4.12 MAP Khusus Perempuan Di Desa Balukherin	107
17.	Gambar 4.13 Wawancara dengan Ketua UPK Kecamatan Lewolema	109
18.	Gambar 4.14 Diskusi Pelaku PNPM –MP Kecamatan Lewolema	115

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya mengatasi masalah pembangunan khususnya kemiskinan pada hakekatnya telah lama dilaksanakan pemerintah Indonesia. Beragam program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam waktu yang cukup lama untuk mengatasi permasalahan tersebut di Indonesia, baik melalui pemerintah pusat seperti: Program Pemberdayaan Daerah akibat krisis ekonomi (PDM-DKE), Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Bantuan langsung Masyarakat (BLM) serta program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh daerah. Namun pada kenyataannya program dan kebijakan tersebut belum banyak merubah kondisi (kehidupan masyarakat) Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada data statistik mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 36, 1 juta jiwa atau sekitar 16, 66 persen (BPS, 2004).

Sebuah studi tentang kemiskinan (Yunus R, 2009) mengemukakan kesimpulan menarik mengenai mengapa berbagai program pemerintah tidak mengubah kondisi kemiskinan yaitu banyaknya penduduk yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tersentuh, sebab penentuan kelompok sasaran program pengentasan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga yang paling membutuhkan bantuan sering terpinggirkan. Data tersedia pada umumnya hanya menjelaskan indikasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan tidak dapat mengungkapkan efektifitas penggunaan dalam mengatasi kemiskinan di daerah atau dalam suatu kelompok masyarakat tertentu serta berapa banyak penduduk miskin yang telah diangkat derajat hidupnya

melalui program tersebut (Yunus.R, 2009). Hal tersebut menunjukkan secara umum masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa yang menjadi dasar tujuan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah untuk: (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dari keempat tujuan ini, tiga di antaranya secara jelas menyatakan tentang kualitas kehidupan masyarakat Indonesia yaitu butir pertama, kedua, dan ketiga yakni kehidupan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, dan cerdas. Sedangkan untuk penyaluran dan pemerataan kualitas hidup tersebut dirumuskan dalam sila Kelima Pancasila yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah keterlindungan, kesejahteraan, dan kecerdasan masyarakat haruslah tersalurkan secara adil. Keempat hal diatas merupakan acuan dasar penggambaran perencanaan pembangunan di Indonesia yang selama ini telah dilakukan.

Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah wilayah-wilayah yang dihuni komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi serta keterbatasan prasarana dan sarana infrastruktur menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya meliputi pembangunan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial, budaya dan keamanan.

Disamping itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup juga memerlukan perhatian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka diperlukan program pembangunan yang lebih difokuskan pada upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas dan ketersediaan infrastruktur masih tertinggal. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil, seperti daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, rawan bencana alam dan bencana sosial. Salah satunya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan telah menjangkau desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia. Di dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dijelaskan bahwa PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang tujuan umumnya meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Intervensi melalui program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sesuai dengan pendapat Shardlow yang mencermati pemberdayaan sebagai program dimana dalam tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan dengan periode waktu tertentu, Shardlow (dalam Adi, 2008:78).

Selanjutnya pelaksanaan program pemberdayaan menunjukkan peran pemerintah dalam manajemen pembangunan mendasar yang menurut Sedarmayanti termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pembangunan sosial ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam hal ini

pemerintah berperan dalam menjalankan fungsi pembinaan, fasilitator, pengawasan dan pemberdayaan (Sedamayanti,2004:24).

Dalam setiap rancangan program terdapat tahap evaluasi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam rangkaian sebuah program. Cesley dan Kumar (1987) dalam Oakley dan Clayton (2001:5) mengatakan bahwa "*evaluation is a periodic assessment of relevance, performance, efficiency and impact of the project in context of is stated objective*". Hal ini berarti evaluasi merupakan suatu penilaian berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak dari suatu proyek dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Toolkit Save the Children (2006) yang dimaksud evaluasi adalah penilaian pada suatu waktu untuk menilai hasil dari suatu proyek atau program dan sejauh mana tujuan proyek tersebut telah tercapai. Apakah terdapat perubahan sebagai hasil dari proses dalam proyek tersebut. (hal:108). Patton (1997) Evaluasi program adalah proses pengumpulan informasi yang sistemis tentang kegiatan, karakteristik dan hasil-hasil dari program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program dan menginformasikan keputusan bagi masa depan program.

Selanjutnya pengertian evaluasi program menurut Patton adalah "*Program evaluation is the systematic collection of information a boutthe activities, charateristic and outcomes of programs to make judgement a bout the program, improve program effectiviness, and/or inform decision a bout the future programming*". (Shaw et al 2006: 23). Yang berarti bahwa evaluasi program merupakan kumpulan informasi yang sistematis tentang aktivitas, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, untuk

meningkatkan efektivitas program dan/atau menginformasikan keputusan tentang program masa yaang akan datang.

Pengertian evaluasi sumatif menurut Patton adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektifitas dari keseluruhan pelaksanaan prgram yang diperlukan bagi pengambilan keputusan akan keberlanjutan atau penghentian sebuah program (hal 67). Selanjutnya Scriven (1991) mendefinisikan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program atau setelah program berakhir (2006:67).

Dunn (2003) menjelaskan bahwa tipe evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai produ-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. (Dunn, 2003:614). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggambarkan dampak dari kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPMMandiri Perdesaan.

Menurut Patton dalam penelitian Evaluatif, seorang evaluator juga bertindak sebagai peneliti, fasilitator dan konsultan ataupun akuntan sesuai dengan informasi yang ingin didapat dan siapa *user* dari evaluasi tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan tujuan dan indikator program yang dievaluasi (Shaw et al, 2006:25)

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi terhadap tujuan jangka menengah. Model evaluasi ini menurut Bank Dunia (2004) adalah evaluasi *outcomes* yang merupakan teknik yang tepat untuk melihat keterkaitan sebuah program dengan tujuan jangka menengah yang diharapkan. Komponen-komponen dalam evaluasi *outcomes* antara lain : *Inputs*, yang adalah

sumberdaya program; *Activities*, yang menunjukkan bagaimana program tersebut dijalankan; *Outputs* produk yang dihasilkan dari kegiatan; *outcomes* adalah tujuan jangka menengah yang merupakan hasil dari *activities* dan *outputs*, sedangkan *impact* adalah tujuan jangka panjang yang timbul akibat dari program tersebut, (2004:2-7).

Terkait dengan proses pembangunan, Hubeis menyatakan bahwa fakta empiris membuktikan bahwa dalam pembangunan khususnya pembangunan ekonomi dengan menyertakan sebagai aset sumber daya manusia strategis telah banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia. *The Asia Foundation* menyatakan bahwa perempuan di Indonesia merupakan pemilik dari 35 % usaha kecil dan mikro yang secara pasti turut memacu percepatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menurut data BPS, persentase penduduk perempuan pada tahun 2004 adalah sebanyak 49,84 % yang berarti bahwa sebagai aset sumber daya manusia maka perempuan mempunyai peran strategis dalam kelangsungan ekonomi keluarga, karena selain berperan sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak, mereka juga berperan mencari nafkah, (Hubeis, 2010:181).

Salah satu komponen dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yaitu, komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. Ruang lingkup kegiatannya yaitu menyediakan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan

dana bergulir tersebut. Salah satunya melalui kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam yang dikelola kelompok perempuan (UEP-SPP).

Alokasi dana BLM PNPM mandiri perdesaan untuk Kecamatan Lewolema sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 4.750.000.000. Dari total dan tersebut dialokasikan untuk SPP sebesar Rp. 1.128.125.000. Berdasarkan proposal kegiatan usaha ekonomi produktif Kelompok SPP Desa Sinar Hading mengelolah dana usaha sebesar Rp. 926.625.000,- dan Desa Balukhering sebesar Rp. 558.500.000. Dana tersebut dikelola oleh 29 Kelompok SPP dengan 151 Anggota untuk Desa Balukhering dan 21 Kelompok SPP dengan 373 Anggota untuk Desa Sinarhading.

Berdasarkan diskusi dengan Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Lewolema, dicermati bahwa Kelompok SPP yang tersebar di Kecamatan Lewolema sejak tahun 2009 ketika program PNPM Mandiri Pedesaan masuk ke Kecamatan Lewolema sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat sebanyak 84 kelompok dengan jenis usaha ekonomi yang beraneka ragam. Dengan kata lain tidak ada usaha yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok PPP. Setelah pencairan dana dari UPK ke kelompok, dana tersebut dibagikan kepada semua anggota kelompok untuk menjadi modal usahanya masing-masing. Selanjutnya dikatakan bahwa, terkait dengan evaluasi Kelompok SPP dalam pelaksanaan kegiatan selama ini dengan menggunakan instrumen yang ada yaitu evaluasi audit dana (penggunaan dan pengembalian dan oleh kelompok) dan instrumen supervisi monitoring terhadap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya sampai pada evaluasi tahapan *output* atau evaluasi

berhenti ketika program / kegiatan berakhir sehingga belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengukur dampak program ketika program telah berakhir.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM-MP khususnya kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP), pelaku program di tingkat kecamatan hanya berorientasi pada pemanfaatan dana bergulir dalam arti memberikan pinjaman dan menerima cicilan dari kelompok kaum perempuan, kurang memperharikan dampak program terhadap usaha kelompok perempuan dan penguatan kelembagaan kelompok perempuan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan jangka menengah kegiatan SPP yaitu mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul "**Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan Di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering)**".

B. Pemasalahan

Program PNPM Mandiri Perdesaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 secara khusus kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) kurang berjalan sebagai mana mestinya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Apakah hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan audit internal per tahun anggaran oleh Pelaksana Program di tingkat kecamatan telah secara konperhensif menunjukkan

pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP pada Kelompok SPP Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering ? Oleh karena itu diperlukan evaluasi yang konperhensif dan sesuai dengan kaidah evaluasi program yang ada.

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kegiatan SPP yang dijalankan telah memberikan hasil sesuai dengan tujuan jangka menengah yang telah direncanakan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan jangka menengah dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering?

C. Tujuan Penelitian

Suatu program dibuat untuk menanggapi suatu keadaan dan menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Tujuan atau hasil dari suatu program merupakan hal yang sangat penting bagi stekholder untuk mengarahkan kegiatan dan alokasi dana serta melihat keefektifan suatu program demi keberlanjutan program ke depan. Evaluasi ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan hasil jangka menengah kegiatan SPP sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
2. Menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering Kecamatan Lewolema.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi:

- a. Pengambil kebijakan dan keputusan mengenai Program PNPM Mandiri Pedesaan agar dapat sesuai dengan kondisi riil dalam pelaksanaan serta dapat mengatasi hambatan – hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan program khususnya pada kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan.
- b. Kelompok SPP Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering dalam upaya pemanfaatan produk program secara maksimal dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha ekonomi produktif yang mereka lakukan.

2. Manfaat Akademis

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti hal yang sama sebagai penambah referensi dan wawasan dalam penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan pemberdayaan yaitu kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2012:27) negara adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang mempunyai minimal lima komponen utama, yakni : *pertama*, komponen lembaga negara yaitu lembaga-lembaga negara, yaitu pemerintahan atau eksekutif, lembaga perundangan atau legislatif, dan lembaga peradilan atau yudikatif.

Kedua, komponen rakyat sebagai warga negara (*citizen*). Rakyat berkembang dalam bentuk masyarakat-masyarakat kewargan atau *civil society* yang menjadi instrumen penyeimbang (*countervailing*) terhadap negara untuk memastikan bahwa negara bekerja untuk mencapai misinya-*raison d'etre*-nya.

Ketiga, wilayah yang diakui kedaulatannya. Hari ini kita masih memahami wilayah sebagai sebuah kawasan fisik yang kasat mata. Negara-negara di dunia, kecuali negara Palestina, adalah negara yang mempunyai batasan fisik geografis dan diakui oleh negara sekelilingnya dan Persatuan Bangsa-Bangsa. Ke depan akan berkembang *virtual nations* yang mempunyai wilayah yang maya.

Keempat, komponen kebijakan publik. Setiap negara modern dipastikan mempunyai konstitusi, peraturan perundangan, keputusan kebijakan sebagai aturan main hidup bersama. Kebijakan publik menjadi komponen penting yang diabaikan oleh ilmuwan politik. Kebijakan publik termasuk di dalamnya *Tata Kelola Negara (governance)*, yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyat. Pertanyaannya bukan *bagaimana mengendalikan negara*, tetapi *bagaimana memanajemeni negara?*

Kelima, komponen Ideologi. Ideologi adalah keyakinan politik suatu kesatuan politik yang disebut negara merdeka dan berdaulat. Ideologi diturunkan menjadi politik kebangsaan, apa pun bentuknya baik demokrasi maupun non demokrasi. Produk akhir dari ideologi, dan kemudian politik adalah kebijakan publik. *When ideology end, politics begin. When politics end, public policy begin.*

Taliziduhu Ndraha dalam *Kyubernologi* (2003:492-499) mengatakan bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata *policy* yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam kyubernology adalah sistem nilai dari kearifan lokal aktor atau lembaga yang bersangkutan yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Kebijakan Publik Sebagai Sistem Nilai



Sumber : Taliziduhu Ndraha (2003: 499)

Kebijakan publik memiliki dimensi konseptual dan dimensi proses (pembentukan). Baik kecerdasan intelektual (teoritis) maupun kearifan lokal

(sistem nilai) senantiasa mengisi ruang-ruang dalam kedua dimensi tersebut. Memahami kebijakan publik secara benar akan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan sebuah kebijakan publik.

Pendapat beberapa ahli administrasi publik yang lain di antaranya adalah Hill dan kawan-kawan. Hill (1993:47) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *'the product of political influence, determining and setting limits to what the state does'*. Sementara Anderson berpendapat bahwa *To be more precise, when a government takes a decision or chooses a course of action in order to solve a social problem and adopts a specific strategy for its planning and implementation, it is known as public policy. Policy scientists argue that public policy is best conceived in terms of a process (Jenkins, 1978, Rose, 1976; Anderson, 1978). This is because policy decisions are not something confined to one level of organization at the top, or at one stage at the outset, but rather something fluid and ever changing' (Gilliat, 1984:p.345). Rose (1969: p.xi) also made a similar argument when he said, 'policy making is best conveyed by describing it as a process, rather than as a single, once-for-all act'*.¹

Guna mendapatkan pemahaman dasar tentang kebijakan publik dapat dirujuk pada pendapat Riant Nugroho (2012:43) yang mengatakan bahwa pada dasarnya, meskipun tidak tertulis, memahami kebijakan publik terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu *kontinentalis* dan *anglo saxonis*.

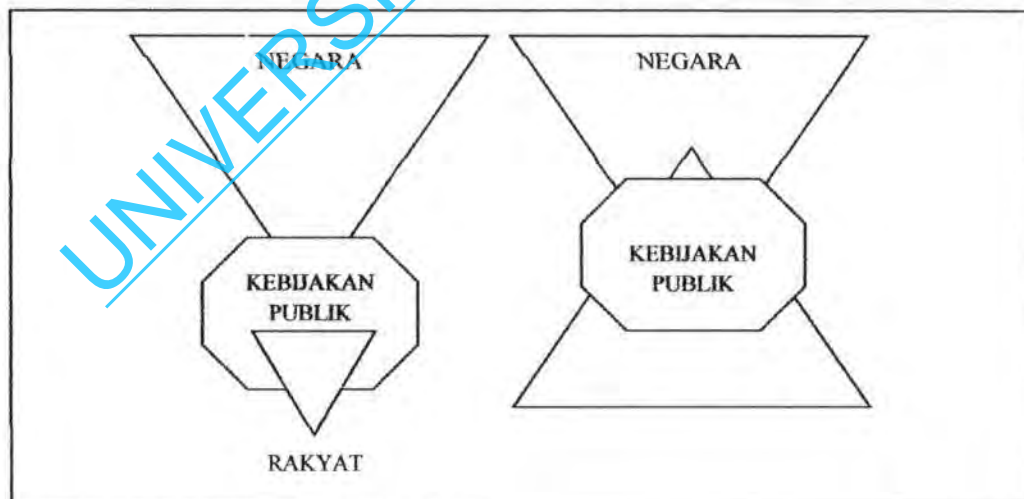
1. *Kontinentalis*, yang cenderung melihat kebijakan publik adalah turunan dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya

¹ <http://www.cdrb.org/journal/2002/3/3.pdf>

sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara. Keberadaan publik tidak mempunyai dukungan secara politik dan yuridis formal. Pemahaman ini dapat dipahami sistem politik Indonesia masih sangat berorientasi pada sistem kontinental, dan Belanda merupakan salah satunya. Dalam cara pandang kontinental, kebijakan publik adalah hukum publik atau bahkan ada yang lebih ekstrim memahami kebijakan publik sebagai salah satu bentuk dari hukum publik atau hukum tata negara. Pemahaman ini sangat kuat dengan *Recht-Staat-isme* yang berkembang di Eropa.

2. *Anglo-Saxonis*, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah turunan dari politik demokrasi sehingga melihatnya sebagai sebuah produk interaksi antara negara dan publik. Kebijakan publik adalah produk pertemuan kepentingan negara dan masyarakat.

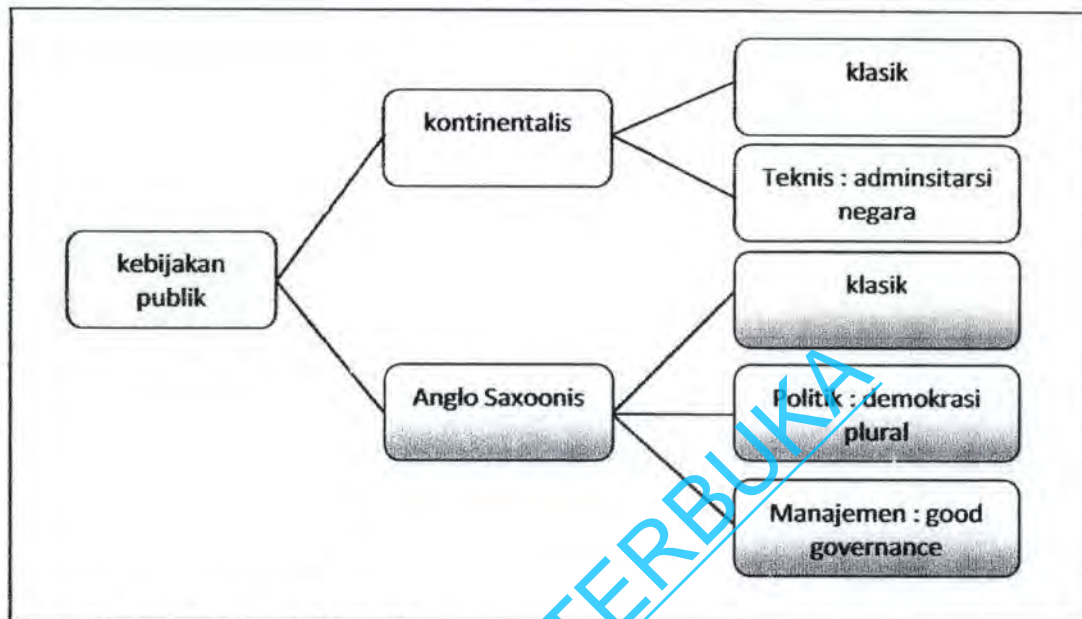
Gambar 2.2. Model Pemahaman Kebijakan Publik



Sumber : Riant Nugroho (2012:43)

Berdasarkan pendapat Riant Nugroho di atas maka pemahaman kebijakan publik dapat dikembangkan dengan model pemahaman sebagaimana digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.3. Pengembangan Pemahaman Kebijakan Publik



Sumber : Riant Nugroho (2012:43)

Bagaimana model kebijakan publik di Indonesia? Menurut Riant Nugroho (2012:58) Negara Indonesia cenderung menggunakan model *kontinentalisasi* baik dalam pemahaman maupun praktek. Kecenderungan ini paling tidak disebabkan tiga hal yakni : *Pertama*, Negara Indonesia yang tidak terpisahkan dari perjalanan historis bangsa yang mewarisi sistem administrasi publik Belanda. Bahkan para *founding fathers* Indonesia mulai Soekarno, Hatta, Sjahrir hingga Juanda adalah intelektual dengan basis pengetahuan Belanda. *Kedua*, para ahli hukum Indonesia pun berkiblat ke Belanda hingga saat ini. *Ketiga*, pada perkembangan terkini di Indonesia mulai berkembang wacana kebijakan publik dalam aras pemikiran-pemikiran yang *Anglo-saxionist* yang dikembangkan oleh ilmuwan administrasi publik yang berlatar belakang Amerika. Jadi pada dasarnya tidak menjadi masalah suatu negara memilih pendekatan

kontinentalis sebagai model utamanya dalam mengembangkan kebijakan publik. Hanya yang harus disadari sejumlah *ceteris paribus* yang diperlukan, yakni : tidak banyak kebijakan publik yang harus dibuat karena sudah ada dan memadai; tingginya kualitas aparatur negara dan pemerintahan; dan proses artikulasi dan agregasi kepentingan publik telah melembaga dalam sistem politik yang sudah ada.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:23) aspek-aspek yang harus dipahami dalam kebijakan publik adalah *pertama*, kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau olatindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. *Ketiga*, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempermosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah,

tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Dengan memahami pengertian kebijakan publik sebagaimana diuraikan di atas maka perlu juga dipahami mengenai jenis-jenis kebijakan publik. Riant Nugroho (2012:173) mengatakan bahwa pembagian kebijakan publik dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Kebijakan publik dijabarkan dalam makna kebijakan publik, yaitu :
 - a. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan.
 - b. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau dibiarkan.
2. Pembagian berdasarkan bentuknya.
 - a. Kebijakan publik dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan.
 - b. Kebijakan publik dalam bentuk peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati yang disebut konvensi-konvensi.
3. Pembagian berdasarkan karakter kebijakan publik.
 - a. Regulatif versus deregulatif.
 - b. Alokatif versus distributif

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum
2. Kebijakan pelaksanaan
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional

Kebijakan publik, jika dikonstruksi, baik pada tataran empirik maupun pada tataran normatif merupakan suatu proses yang senantiasa mengikuti alur tertentu. Hal ini sebagaimana pendapat William Dunn (2000:24) yakni bahwa tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah :

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dandiangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali semetara lainnya ditunda untuk waktu lama.

2. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

3. Adopsi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.

4. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5. Penilaian Kebijakan

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Kebijakan publik memiliki konsekuensi dan implikasi yang luas dan dapat menjangkau waktu yang lama. Para pengambil kebijakan bisa berhenti atau

telah tiada namun kebijakan tetap selalu ada. Oleh karena itu upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik senantiasa terus dilakukan beriringan dengan setiap terjadinya pembentukan kebijakan publik. Langkah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja kebijakan publik perlu didukung dengan kemampuan menganalisis sebuah kebijakan publik.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik atau *public policy*, adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan input yang tersedia berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan. Atau suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7). Menurut Thomas R. Dye penulis buku "*Understanding Public Policy*", yang dikutip oleh Riant Nugroho (2004:3) kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

Jadi Kebijakan Publik pada dasarnya berorientasi pada pemecahan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan publik dapat dikatakan sebagai ilmu terapan yang berperan sebagai *problem solver*. Dalam konteks ini kebijakan publik dan pengambil kebijakan itu harus memiliki orientasi pada kepentingan publik yang kuat. Islamy (1997) menyebutnya dengan "semangat kepublikan" (*the spirit of publicness*).

Pada tataran konseptual jelas dimengerti bahwa kebijakan publik harus memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan

berorientasi pada pelayanan kepentingan tersebut atau dapat mengakomodasi kepentingan publik. Namun untuk mencerna apakah yang dimaksud dengan kepentingan publik ternyata sangat rumit dan memerlukan kajian yang mendalam. Kepentingan publik yang dimaksud jelas merupakan proses tarik menarik dari berbagai kepentingan masyarakat. Adanya tarik menarik kepentingan dari masing-masing stakeholders, baik antara masyarakat dengan institusi maupun antara institusi satu dengan institusi lainnya memerlukan suatu formulasi atau langkah-langkah analisis kebijakan publik untuk mencapai penyelesaian agar masing-masing stakeholders dapat terwadahi sesuai dengan kepentingannya.

Sedangkan pada tataran implementasi diperlukan pemahaman tentang kedudukan dan peran strategis dari pemerintah sebagai *public actor*, sehingga diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

B. Analisis Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2012:294) analisis kebijakan adalah teori yang berasaldari pengalaman terbaik, dan bukan diawali dari temuan, kajian akademik atau penelitian ilmiah. Artinya teori tentang analisis kebijakan adalah *lay theory*, bukan *academical theory*. Dengan demikian pengembangan teori analisis kebijakan di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh keberhasilan -dan kegagalan-kegagalan- yang terjadi di lingkungan administrasi publik. Ranah keberhasilan-kegagalan analisis kebijakan berkenan dengan produk *final*-nya yaitu kebijakan publik. Di sini kita perlu memahami "ruang" bagi kebijakan itu sendiri.

Menurut William Dunn (2000:1) analisis kebijakan (*policy analysis*) adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-aktivitas tersebut berurutan sesuai waktunya dan melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks. Analisis kebijakan deskriptif (*descriptive policy analysis*) aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan akibat kebijakan. Sedangkan Analisis kebijakan normatif (*normative policy analysis*) aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang dan masa mendatang.

Analisis kebijakan selain dilihat sebagai sebuah konsep juga dilihat sebagai sebuah proses karena kebijakan publik sendiri lahir dari sebuah proses. Guna memahami proses dalam analisis kebijakan maka diperlukan metodologi yang merangkai semua bagian-bagian dalam proses tersebut. William Dunn (2000:21) mengatakan bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Masalah (definisih).

Perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisih masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan

agenda. Masalah kebijakan publik adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

Fase-fase perumusan masalah kebijakan disusun sebagai berikut :

- Pencarian masalah
- Pendefinisihan masalah
- Spesifikasi masalah.
- Pengenalan masalah.

2. Peramalan (prediksi).

Peramalan atau *forecasting* adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial di masa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Ini dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan.

Peramalan mengambil tiga bentuk, yakni :

- Peramalan ekstrapolasi (proyeksi).
- Peramalan teoretis (prediksi).
- Peramalan penilaian pendapat (*conjecture*).

3. Rekomendasi (perskripsi).

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis kebijakan menentukan alternatif terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi, dan advokasi mempunyai empat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu *apakah pernyataan advokasi* :

- dapat ditindaklanjuti (*actionable*)?

- bersifat prospektif?
- bermuatan 'nilai'-selain fakta?
- etik?

Rekomendasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan.

4. Pemantauan (deskripsi)

Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Hasil kebijakan dibedakan antara keluaran (*outputs*) yaitu produk layanan yang diterima kelompok sasaran kebijakan, dan *impacts* yaitu perubahan perilaku yang nyata yaitu pada kelompok sasaran kebijakan. Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan.

5. Evaluasi

Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menakankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan : "*Apakah perbedaan yang dibuat?*". Evaluasi membuahakan pengetahuan relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu

pengambil kebijakan pada tahap penilaian terhadap proses pembuatan kebijakan.

Sebagai perbandingan terhadap pendapat di atas Solichin (2008:198) menambahkan satu proses lagi yakni *revisi kebijakan* atau *pengakhiran kebijakan*. Selengkapnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Isu-isu/masalah kebijakan dan penyusunan agenda pemerintah.
2. Perumusan kebijakan dan program-program.
3. Bentuk kebijakan dan muatan/konten kebijakan.
4. Implementasi kebijakan dan program.
5. Evaluasi dampak kebijakan.
6. Revisi kebijakan atau pengakhiran kebijakan.

Lebih lanjut William Dunn² mengatakan bahwa *public policy analysis introduces students to the process and methodology of public policy analysis. Using a problems-oriented and a multidisciplinary synthesis approach, this text bridges the gap between theory and practice. The text draws from political science, public administration, economics, decision analysis, and social and political theory to achieve the only integrated, multidisciplinary text on policy analysis currently available.*

Budi Winarno (2012:340) mengatakan bahwa ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan publik, yakni : *pertama*, fokus utamanya adalah pada penjelasan kebijakan bukan pada anjuran kebijakan yang 'pantas'. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah. *Ketiga*, analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat

² <http://www.pearsonhighered.com/educator/product/Public-Policy-Analysis-Introduction-4E/9780136155546.page> diunduh pada tanggal 7 Agustus 2013

diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik pembentukanya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda.

Pada akhirnya analisis kebijakan publik sangat berguna dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengandemikian antara kebijakan publik, analisis kebijakan publik dan anjuran kebijakan publik merupakan tiga area kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah kegiatan menilai tingkat kinerja suatu kebijakan publik dan mencari terobosan baru untuk penyempurnaan. Evaluasi merupakan sebuah proses analisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memberikan penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat?”. Artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta dan tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan (Dunn, 2000:36).

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) yang menyatakan usahan untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

Lebih lanjut Dunn menjelaskan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu :

“Pertama, dan yang paling penting evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas. Ketiga, evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain”, Dunn (dalam Samodra dkk, 2000: 609-611).

Ketiga fungsi evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn di atas, sejalan dengan pendapat Wibawa dkk, evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi yaitu :

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut. Wibawa dkk (dalam Nugroho, 2011:675-676).

Laster dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atau tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya? Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama. Setelah diketahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat

mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan, (dalam Winarno,2012:229).

Evaluasi sebuah kebijakan menurut Subarsono mempunyai tujuan antara lain :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (Subarsono, 2012:120-121).

Lebih lanjut Subarsono mengemukakan beberapa alasan dilakukan evaluasi kebijakan yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipanami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan penerima manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan kepada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik. (Subarsono, 2012:123-124).

Menurut Toolkit Save the Children (2006) yang dimaksud evaluasi adalah penilaian pada suatu waktu untuk menilai hasil dari suatu proyek atau program dan sejauh mana tujuan proyek tersebut telah tercapai. Apakah terdapat perubahan sebagai hasil dari proses dalam proyek tersebut. (hal:108). Definisi lain oleh para ahli evaluasi (dalam Shaw et al, 2006 :6) adalah :

a. Lincoln dan Guba (1986)

Jenis penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai (manfaat dan kegunaan) dari beberapa entitas. Evaluasi menilai program, fasilitas, kinerja dan sejenisnya dalam rangka untuk meningkatkan atau memperbaiki (evaluasi formatif) atau untuk menilai dampak (evaluasi sumatif).

b. Scrven (1991)

Suatu proses penentuan manfaat dan kegunaan atau nilai dari sesuatu atau produk dari proses tersebut. Dalam proses evaluasi pada umumnya terdapat proses identifikasi standar dari kegunaan, manfaat atau nilai.

c. Patton (1997)

Evaluasi program adalah proses pengumpulan informasi yang sistemis tentang kegiatan, karakteristik dan hasil-hasil dari program untuk membuat penilaian tentang program, meningkatkan efektivitas program dan menginformasikan keputusan bagi masa depan program.

D. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dalam kamus, program adalah rencana, program adalah kegiatan yang dilakukan dengan saksama.

Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang daimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993:297).

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

Menurut Endang Mulyatiningsih (2011:114-115) mengemukakan bahwa evaluasi program bertujuan untuk:

1. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama di tempat lain.
2. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksanaan berfikir menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.

Dalam setiap rancangan program terdapat tahap evaluasi. Kenyataan itu menunjukkan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam rangkaian sebuah program. Cesley dan Kumar (1987) dalam Oakley dan Clayton (2001:5) mengatakan bahwa "*evaluation is a periodic assessment of relevance, performance, efficiency and impact of the project in context of its stated objective*". Hal ini berarti evaluasi merupakan suatu penilaian berkala terhadap

relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak dari suatu proyek dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengertian evaluasi program menurut Patton adalah *"Program evaluation is the systematic collection of information about the activities, characteristics and outcomes of programs to make judgement about the program, improve program effectiveness, and/or inform decision about the future programming"*. (Shaw et al 2006: 23). Yang berarti bahwa evaluasi program merupakan kumpulan informasi yang sistematis tentang aktivitas, karakteristik dan hasil program untuk membuat penilaian tentang program, untuk meningkatkan efektivitas program dan/atau menginformasikan keputusan tentang program masa yang akan datang.

Pengertian evaluasi sumatif menurut Patton adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektifitas dari keseluruhan pelaksanaan program yang diperlukan bagi pengambilan keputusan akan keberlanjutan atau penghentian sebuah program (hal 67). Selanjutnya Scriven (1991) mendefinisikan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah pelaksanaan program atau setelah program berakhir (2006:67).

Dunn (2003) menjelaskan bahwa tipe evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai produ-produk kebijakan dan program publik yang stabil dan mantap. (Dunn, 2003:614). Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggambarkan dampak dari kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Menurut Patton, dalam penelitian Evaluatif, seorang evaluator juga bertindak sebagai peneliti, fasilitator dan konsultan ataupun akuntan sesuai dengan informasi yang ingin didapat dan siapa *user* dari evaluasi tersebut. Hal ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan tujuan dan indikator program yang dievaluasi (Shaw et al, 2006:25)

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu evaluasi terhadap tujuan jangka menengah. Model evaluasi ini menurut Bank Dunia (2004) adalah evaluasi *outcomes* yang merupakan teknik yang tepat untuk melihat keterkaitan sebuah program dengan tujuan jangka menengah yang diharapkan. Komponen-komponen dalam evaluasi *outcomes* antara lain: *Inputs*, yang adalah sumberdaya program; *Activities*, yang menunjukkan bagaimana program tersebut dijalankan; *Outputs* produk yang dihasilkan dari kegiatan; *outcomes* adalah tujuan jangka menengah yang merupakan hasil dari *activities* dan *outputs*, sedangkan *impact* adalah tujuan jangka panjang yang timbul akibat dari program tersebut, (2004:2-7).

E. Penelitian Sebelumnya

Boy Reonaldi Sihombing (2009) melakukan penelitian tentang Peranan Camat Dalam Upaya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Studi Kasus Pada Kecamatan Pancur Batu, menyimpulkan bahwa peranan Camat terlihat sangat lemah dalam mengontrol Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Cindy Fristary Unando (2010) mengadakan penelitian tentang Efetifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Studi Kasus Program Simpan Pinjam Perempuan

pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Hasil penelitian disimpulkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan, khususnya Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Tilatang Kamang masih belum efektif. Hal ini dapat terlihat bahwa program ini belum mencapai sasaran secara maksimal, meskipun dapat menunjukkan proses pencapaian tujuan. Selain itu, masih ditemukan banyak penyimpangan pemanfaatan dana yang mengakibatkan tidak mampu memberikan manfaat dalam kesadaran dan pemahaman akan Program SPP, serta keterbatasan alokasi dana dalam melaksanakan Program SPP ini, adanya aturan atau prosedur yang menyebabkan tidak semua tujuan dari program ini dapat tercapai. Kurang lancarnya pengembalian modal pinjaman ke UPK Kecamatan. Adanya persepsi atau pandangan masyarakat tentang program SPP ini, dan kurangnya partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam melaksanakan program SPP.

Dian Novi Asrini (2010) mengadakan penelitian tentang Bargaining Power Perempuan Dalam Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa bargaining power perempuan dalam kegiatan simpan pinjam ini terlihat sangat lemah dari awal peminjaman sampai kepada pengembalian, kebanyakan penyebab dari ibu-ibu ini tidak bisa mengembalikan uang pinjaman tersebut karena faktor suami yang mendominasi kehidupannya. Adapun kendala yang dihadapi adalah adanya beberapa kelemahan dalam komunikasi yang tidak jalan antara pengurus sehingga terjadi miskomunikasi yang berakibat berlarut-larutnya masalah penunggakan, lemahnya sumber daya dari kelompok serta tidak adanya kriteria dalam merekrut

anggota menyebabkan pencapaian sasaran untuk rumah tangga miskin tidak maksimal.

Johni Elvis Hura (2011) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Administrasi Pembangunan, Studi pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Hilimo'asio, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang memahami tentang Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan, sehingga pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Hilimo'asio cenderung bermasalah dan tujuan pencapaian Program PNPM Mandiri Perdesaan tidak tercapai.

F. Kerangka Berpikir.

Penelitian ini akan mengukur tujuan jangka menengah dari kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. Tujuan Jangka menengah kegiatan SPP yaitu (a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, (b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, (c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Penjabaran akan ketiga tujan jangka menengah SPP yang akan diteliti pencapaiannya dalam penelitian ini yaitu :

1. **Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar** yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu, berdasarkan ketentuan dasar kegiatan SPP bahwa masyarakat miskin dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan

pendanaan tanpa syarat agunan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dana/modal bagi usaha atau bagi kebutuhan sosial dasar.

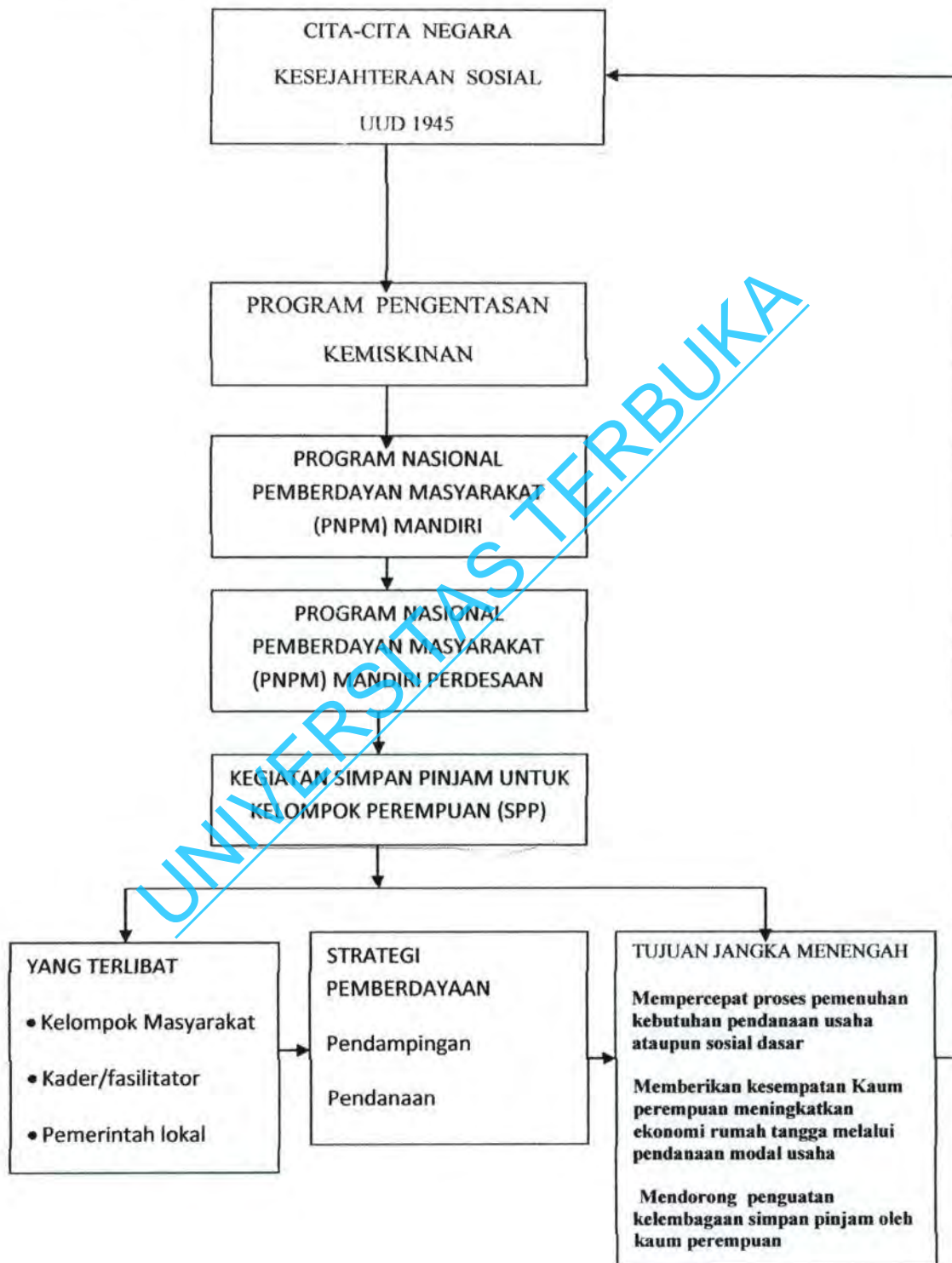
Tujuan ini dapat dikatakan tercapai bilamana anggota SPP dapat memenuhi kebutuhan bagi pendanaan usaha mereka dan ataupun bagi pemenuhan kebutuhan sosial dasar. Kebutuhan sosial dasar dimaksud sesuai dengan kriteria dalam tahap pembuatan peta sosial PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan.

2. **Memberikan kesempatan Kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha**, yang dimaksud dalam PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, keterlibatan perempuan sangat diperhatikan. Khususnya dalam kegiatan SPP, tujuan jangka menengah kedua ini dapat dikatakan tercapai bilamana dalam pelaksanaan kegiatan SPP, seluruh anggota kelompok diberikan kesempatan seluas-luasnya mendapatkan dana atau modal bagi usahanya dan anggota mendapatkan kemudahan untuk mengakses modal tersebut (dalam pengurusan administrasi dan persyaratan).
3. **Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan**, dana kegiatan SPP disalurkan kepada kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman dan kelompok tersebut telah diverifikasi. Mencermati hal tersebut maka tujuan jangka menengah

ketiga ini dapat dikatakan tercapai bilamana melalui kegiatan SPP ini, kelompok SPP tersebut mengalami penguatan dalam kelembagaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pengelolaan simpan pinjam. SPP diharapkan kedepannya secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam.

UNIVERSITAS TERBUKA

Kerangka berpikir seperti tersebut di atas dapat digambarkan dalam skema penelitian sebagai berikut :



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian ilmiah yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Umumnya penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena atau gejala-gejala sosial. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.

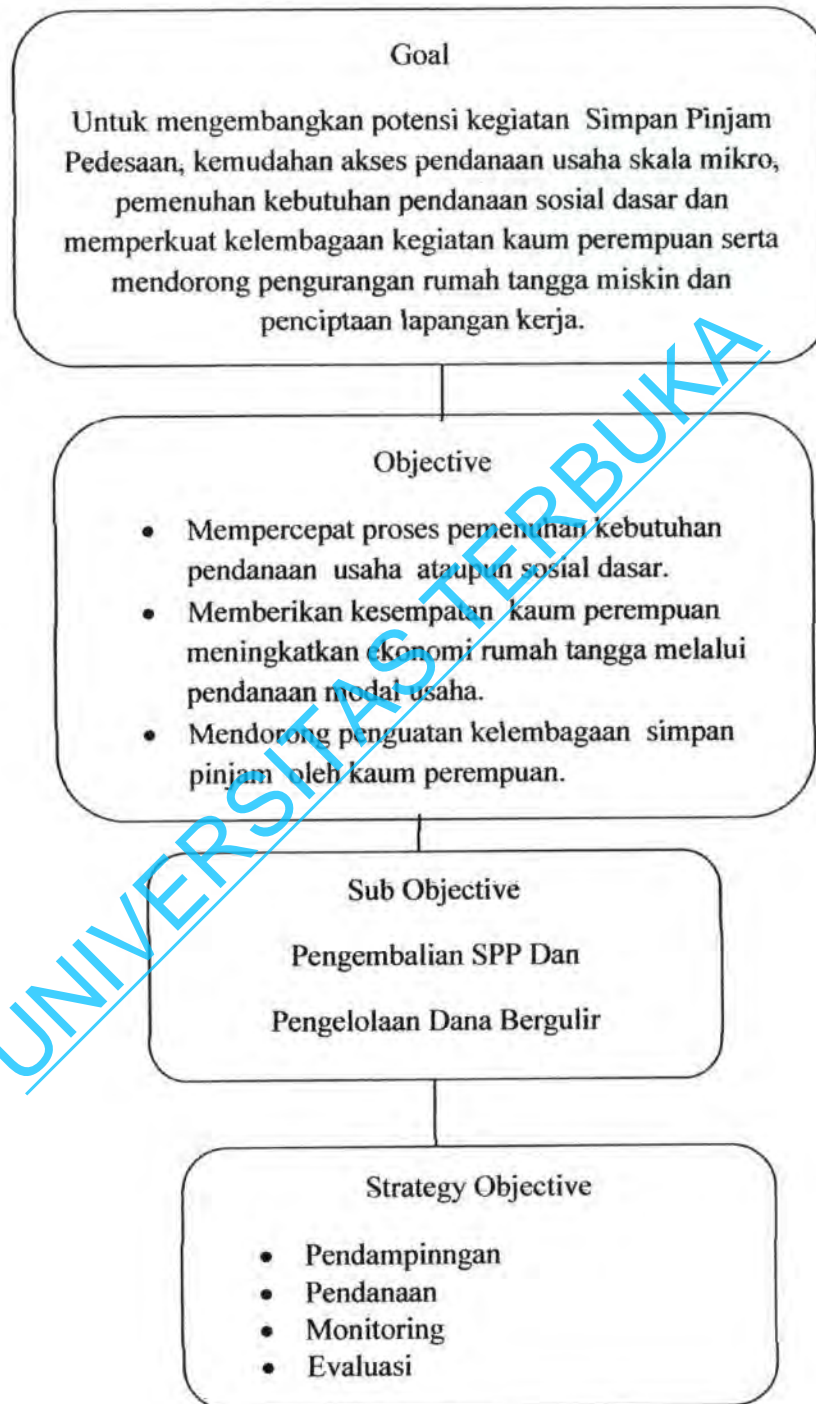
Penelitian kualitatif memberikan keuntungan seperti : 1) fleksibilitas dalam mengikuti gagasan yang tidak terduga selama penelitian dan proses eksplorasi yang lebih efektif, 2) memiliki sensitivitas pada faktor-faktor kontekstual, 3) memiliki kemampuan mempelajari dimensi simbolik dan pengertian sosial, 4) meningkatkan kesempatan seperti membangun dukungan empirik pada teori-teori

dan gagasan-gagasan baru, mendalami fenomena yang ada dan lebih relevan dan menarik untuk para praktisi.

Tujuannya penelitian ini menggambarkan kenyataan yang terjadi sebagai dampak pelaksanaan sebuah Program. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau lebih. Dengan kata lain, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sejauh mana kegiatan ini mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan sejak awal pelaksanaan Kegiatan SPP di UPK Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan berupa penelitian evaluatif terhadap suatu kelompok masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sinar Hading dan masyarakat Desa Balukhering sebagai anggota dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan teori dan data yang telah dibahas di atas dan untuk mengevaluasi suatu program maka terlebih dahulu diketahui model perencanaan Kegiatan Program tersebut. Perencanaan Kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan memodifikasi dari perencanaan program kesehatan dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2009 menggambarkan model perencanaan sebagai berikut :



Gambar 3.1. Model perencanaan kegiatan SPP

Sumber : telah diolah kembali

Berdasarkan model perencanaan di atas maka penelitian ini akan mengevaluasi pencapaian *Objective* (tujuan jangka menengah) dari kegiatan SPP.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan Penelitian Studi Kasus (*Case-study Research*) dimana peneliti akan meneliti secara mendalam banyak bagian dari sebuah kasus (individu, kelompok, organisasi, gerakan, kegiatan atau unit dalam wilayah tertentu) dalam suatu periode waktu. Penelitian studi kasus ini secara mendalam akan meneliti satu atau dua kasus atau membandingkan beberapa kasus yang ada untuk menilai faktor-faktor tertentu. Peneliti secara teliti memilih satu atau beberapa kasus kunci untuk menggambarkan isu tertentu dan menganalisa kasus tersebut. Studi kasus dapat membantu peneliti untuk menghubungkan level mikro atau aksi dari individu dengan level makro atau struktur dan proses sosial dalam skala yang lebih besar. Studi kasus dalam penelitian ini adalah Kelompok SPP Kenari Desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Penelitian akan menilai pencapaian tujuan jangka menengah/*Objective* kegiatan SPP ini yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pendampingan dan pendanaan yang merupakan *strategy objective* kegiatan SPP serta menggambarkan faktor pendukung dan penghambat kegiatan SPP.

Fokus penelitian ini mengacu pada model evaluasi terhadap tujuan jangka menengah yaitu evaluasi menurut Bank Dunia (2004) adalah evaluasi *outcomes* yang merupakan teknik yang tepat untuk melihat keterkaitan sebuah program dengan tujuan jangka menengah yang diharapkan. Komponen-komponen dalam evaluasi *outcomes* antara lain : *Inputs*, yang adalah sumberdaya program; *Activities*, yang menunjukkan bagaimana program tersebut dijalankan; *Outputs* produk yang dihasilkan dari kegiatan; *outcomes* adalah tujuan jangka menengah

yang merupakan hasil dari *activities* dan *outputs*, sedangkan *impact* adalah tujuan jangka panjang yang timbul dari akibat program tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering UPK Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Kegiatan SPP yang diteliti dibatasi pada aktivitas program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2012, dimana sejak pertama pencairan dana sampai pada tahap perguliran yang ketiga. Lokasi penelitian ini dipilih karena berdasarkan diskusi dengan pihak UPK kecamatan bahwa kelompok SPP di Desa Sinar Hading cukup sehat dalam pengelolaan dan pengembalian dana dan kelompok SPP di Desa Balukhering kurang sehat dalam pengelolaan dan pengembalian dana. Di lain pihak Peneliti adalah sebagai Camat pada kecamatan Lewolema, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi Kecamatan dalam rangka pengembangan dan pembinaan bagi kelompok - kelompok SPP yang ada di wilayah Kecamatan Lewolema. Berdasarkan hasil evaluasi audit yang dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil dalam pengembalian dan pinjamana dimana evaluasi audit merupakan bentuk evaluasi *output*, sementara evaluasi terhadap pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP belum pernah dilakukan oleh pelaksana program karena program tidak memiliki instrumen untuk menilai pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP dimaksud. Hal ini membuat peneliti ingin melakukan evaluasi secara lebih konperhensif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu pada Bulan Mei 2013.

C. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang masalah yang dicakupi dalam penelitian. Untuk itu dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Informan yang dipilih ialah para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang terlibat langsung dan dianggap cukup memahami pelaksanaan kegiatan SPP yaitu:

1. Aparat Pemerintah terdiri dari Kepala Desa Sinar Hading, Kepala Desa Balukhering dan PJOK Kecamatan Lewolema.
2. Fasilitator PNPM – MP Kecamatan Lewolema 1 orang
3. Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan yang terdiri dari 1 orang Fasilitator Kecamatan dan 1 orang Pendamping Lokal.
4. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lewolema dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa Sinar Hading dan Desa Balukhering
5. Anggota Kelompok SPP sebagai penerima manfaat kegiatan sebanyak 10 orang di desa Balukhering dan 10 orang di desa Sinar Hading.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan penelitian evaluasi ini dalam upaya pengumpulan data, berikut ini metode-metode yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan penelitian.

1. Studi Kepustakaan

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui literatur-literatur ilmiah, pustaka, dan landasan hukum berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas oleh peneliti. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dokumen berupa laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Sinar Hading.

Berbagai teori dalam literatur-literatur tersebut membantu peneliti untuk melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Dokumen ini berguna karena merupakan sumber data yang stabil, memperkaya, dan mendorong, berguna sebagai bukti suatu pengujian, dan hasil dari pengkajian terhadap dokumen dapat membuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara sebagai sebuah teknik pengambilan data dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semi terstruktur (*Semistructure interview*) dimana pelaksanaannya lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, informan diminta pendapat/ idenya terhadap topik penelitian, dalam wawancara semi terstruktur, peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang akan ditanyakan, berupa pertanyaan terbuka dengan banyak *prompts* dan *probes*.

Untuk mendapatkan informasi dari informen, peneliti melakukan wawancara langsung kepada informen di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya. Jika informasi yang diberikan oleh informen tersebut belum lengkap atau masih kurang, maka peneliti melakukan wawancara secara berulang-ulang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pelaku PNPM – MP baik di tingkat kecamatan Lewolema dan desa lokasi penelitian yaitu desa Balukhering dan desa Sinar Hading serta kepada pemanfaat program khususnya kelompok SPP di desa Balukhering dan desa Sinar Hading.

3. Observasi/pengamatan

Pengamatan yang dilakukan ini yaitu observasi partisipatif pasif, hal ini berarti bahwa peneliti datang ketempat kegiatan orang yang di amati tetapi tidak terlibat di dalam aktivitasnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan pada aktivitas usaha anggota kelompok SPP di Desa Sinarhading dan Desa Baluhering tetapi tidak terlibat dalam aktivitas tersebut. Hasil pengamatan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Foto

Sumber foto dapat berasal dari foto yang dihasilkan diri sendiri dan foto yang dihasilkan orang lain yang berkaitan dengan situasi kondisi informen. Foto dalam penelitian ini digunakan untuk memperkaya hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan terhadap anggota kelompok SPP di desa Sinar Hading dan desa Balukhering serta foto-foto kegiatan pelaku program. Berbagai foto dalam penelitian ini membantu

pembaca untuk memahami kondisi usaha maupun kondisi ekonomi rumah tangga para informan.

E. Teknik analisis data.

1. Penelaahan seluru data.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluru data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, dokumen resmi, foto dan sebagainya.

2. Reduksi data

Seluru data di reduksi dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di perlukan.

3. Koding

Peneliti menyusun data menta kedalam kategori konseptual dan memberi nama-nama atau konsep. Aktifitas yang dilakukan bersamaan dalam proses koding yaitu reduksi data dan analisis kategori data. tahapan melakukan koding dalam kualitatif yaitu:

a. Open coding

Dilakukan pada awal ketika data telah terkumpul. Peneliti menempatkan tema dan menetapkan kode inisial sebagai tahap pertama untuk merangkum data dalam kategori analisis atau kode.

Peneliti mempelajari seluru data yang terkumpul kemudian menandai data yang penting dengan memberi kode, dalam hal ini peneliti dapat dengan terbuka menambah tema baru dan dapat mengubah kode inisial.

b. *Axial coding*

Setelah data di beri kode-kode tertentu kemudian peneliti menyusun secara sistematis kode-kode yang ada dan menghubungkan satu dengan yang lain serta menemukan kunci analisis kategori.

c. *Selective coding*

Tahap terakhir dalam proses koding, peneliti memeriksa kembali seluruh data dan kode-kode yang ada dan mencari dengan selektif, kasus sesuai dengan tema penelitian dan membuat perbandingan dan perbedaan setelah sebagian besar atau seluru data telah terkumpul. Peneliti mempelajari data yang telah di beri kode dan memilih data yang dapat mendukung tema penelitian.

F. Teknik untuk meningkatkan kualitas penelitian

1. *Credibility*

Informasi yang di peroleh berdasarkan penemuan terhadap penelitian pengalaman informal sebagaimana yang di alaminya dan di rasakan, dilihat, didengar oleh informan. Informasi dapat dipercayai (*credible*) bila hal tersebut ditunjukkan sebagai deskripsi /gambaran yang tepat atau interpretasi dari pengalaman hidup manusia dimana orang lain yang mengalami hidup yang sama dapat langsung mengenali deskripsi tersebut.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan dilakukan melalui pengecekan rekan sejawat yaitu sesama informan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terhadap kegiatan SPP dan pengecekan terhadap anggota kelompok.

2. *Transferability*

Sebuah hasil Penelitian dapat digunakan oleh orang lain bergantung pada kesamaan antara konteks dan subyek penelitian. Teknik yang digunakan yaitu menggambarkan nominasi sampel, membandingkan sampel dengan data demografi dan deskripsi atau penggambaran yang rinci atau padat sehingga pembaca dapat memahami penemuan yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, subyek penelitian adalah Kelompok perempuan dalam kegiatan simpan pinjam pada PNPM Mandiri Perdesaan, yang digambarkan pada pedoman kegiatan SPP.

3. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif yang penting bukanlah reliabilitas tetapi mengapa suatu perubahan / perbedaan terjadi. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, deskripsi atau penggambaran secara rinci dan padat tentang hasil kegiatan SPP pada anggota Kelompok triangulasi dan pengecekan terhadap informan penelitian.

4. *Confirmability*

Dalam penelitian ini peneliti mementingkan pertemuan yang panjang dengan para informan serta bersikap netral terhadap semua data yang didapatkan dalam penelitian terhadap kegiatan SPP ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Program dan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

I. Gambaran Umum

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pembangunan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah (1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan; (2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri pedesaan yaitu menjadi rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar

desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang di pilih. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya Kemandirian dan Keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khususnya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipasi.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sasaran dalam PNPM mandiri perdesaan berdasarkan lokasi sasaran dengan kriteria pada tahun 2009, lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan kelompok sasaran:

1. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
3. Kelembagaan pemerintah lokal.

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal.
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan.
3. Dapat di kerjakan oleh masyarakat.
4. Didukung oleh sumber daya yang ada.
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri

Perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
3. Kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
4. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Untuk mekanisme usaha kegiatan, setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan / paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah:

1. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh masyarakat desa khusus perempuan.
2. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) di tetapkan oleh musyawara desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan

SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.

3. Usulan kegiatan sarana dan prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas / keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawara desa perencanaan.

Jika usulan non-SPP dari musyawara khusus perempuan sama dengan usulan musyawara desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai suatu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian, masyarakat adalah pelaku utama. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Pelaku di perdesaan yaitu, Kepala Desa (Kades), Badan permusyawaratan Desa (BPD), Tim pengelola kegiatan (TPK), Tim Penulis

Usulan (TPU), Tim pemantau, Tim pemelihara, Kader pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (KPMD/K) dan kelompok Masyarakat (Pokmas).

Tugas pendampingan secara mandiri pada pelaku di perdesaan ini dilakukan oleh KPMD/K dan yang adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat pendirian usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah mewujudkan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.

KPMD/K dipilih dalam musyawara Desa (mudes) sosialisasi yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan. Kemudian setelah Mudes Sosialisasi kegiatan selanjutnya yaitu pelatihan KPMD/K. KPMD/K yang telah terpilih

dalam musyawarah desa sosialisasi, akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diawali dengan proses penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, KPMD/K akan mendapat pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan KPMD/K adalah:

1. Dipahami latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan atau mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Dipahami peran dan tugas KPMD/K.
3. Bertambahnya keterampilan melakukan teknik-teknik fasilitasi pertemuan masyarakat dalam tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk perencanaan secara partisipatif.
4. Bertambahnya keterampilan memberikan pendampingan dan pembimbingan kepada masyarakat agar mampu mengelola PNPM Mandiri Perdesaan secara mandiri.
5. Bertambahnya kemampuan administrasi dan pelaporan yang di perlukan.
6. Bertambahnya kemampuan KPMD/K dalam menyusun rencana kerja.
7. Dipahaminya langka-langka fasilitasi dalam rangka MAD.
8. Dipahaminya instrumen pemetaan RTM basis dusun secara partisipatif.
9. Dipahaminya materi diagram Venn kelembagaan masyarakat.
10. Dipahaminya pola penyampaian informasi.
11. Dipahaminya pola penanganan pengaduan dan masalah.

12. Dipahaminya pola pemantauan dan evaluasi.

Sedangkan pendanaan atas penyelenggaraan pelatihan Kader berasal dari DOK perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, swadaya desa atau masyarakat, serta dari APBD.

Sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan, secara umum tugas dan tanggung jawab KPMD

1. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan peta sosial pada saat musyawara dusun .
2. Mengumpulkan data-data yang di perlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti: data kelompok masyarakat yang ada di desa, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM data pendukung lainnya.
3. Menyebarkan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat desa .
4. Memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksana dan pelestarian.
5. Mendorong dan memastikan penerapan prinsip-prinsip dan kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.
6. Mengikuti pertemuan bulanan dengan PL yang difasilitasi oleh fasilitator kecamatan untnk membahas kendala dan permasalahan yang muncul serta mengambil langka-langka yang di perlukan.

7. Membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisian di desa.
8. Mengefektifkan penggunaan papan informasi di desa dan dusun.
9. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.
10. Mensosialisasikan sanksi dan keputusan lainnya yang telah ditetapkan dalam Musyawara Antar Desa dan Musyawara Desa kepada masyarakat.

Tahapan tugas KPMD/K

- Tahap Perencanaan :
 - a. Menggali gagasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
 - b. Mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalian gagasan sebagai bahan untuk pembahasan di musyawara desa perencanaan usulan desa.
 - c. Membantu Tim Pengelola Kegiatan dan Kepala desa dari persiapan sampai selesainya penyelenggara pertemuan musyawara di desa.
 - d. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawara desa.
 - e. Menyusun usulan desa bersama Tim Penulis usulan.
 - f. Melakukan survey dan mengumpulkan data pendukung usulan termasuk kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerimaan manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan sebagai bahan penulisan usulan.

- g. Menginformasikan kepada masyarakat antar Desa prioritas usulan dan penetapan usulan yang di danai PNPM Mandiri Perdesaan.
- h. Membantu fasilitator Kecamatan dalam memfasilitasi proses penyusunan desain dan rencana anggaran biaya kegiatan yang masuk prioritas untuk didanai.
- Tahap pelaksanaan
 - a. Membantu tim pengelola kegiatan dalam menjalankan mudes pertanggungjawaban dalam musyawara desa serah terima (MDST).
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mudes pertanggung jawaban dan MDST.
 - c. Memberikan masukan dan bimbingan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
 - d. Membentuk TPK dalam pembuatan administrasi yang tertib dan benar.
 - e. Memfasilitasi dan mendorong masyarakat dalam memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam kesediaan adanya swadaya dan pengembalian pinjaman dalam kaitan kelompok SPP maupun pinjaman bergulir.
 - f. Membantu TPK dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan simpan pinjam perempuan, pendidikan, kesehatan dan pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kelompok.

- g. Membantu TPK dalam pengawasan pekerjaan di lapangan, pengendalian kualitas dan produktifitas pekerjaan kegiatan prasarana.
- h. Membantu TPK untuk memfasilitasi proses prngadaan barang dan alat.
- i. Membantu mengawasi pekerjaan di lapangan, terutama pengendalian kualitas dan produtitifitas pekerjaan, seperti mencatat pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dan melaporkan kepada TPK dan Fasilitator Kecamatan.
- Tahap pelestarian
 - a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam mengajukan usulan dari dana pengembalian pinjaman bergulir.
 - b. Memfasilitasi masyarakat desa agar tetap berpedoman pada prinsip dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan dalam memanfaatkan dana bergulir.
 - c. Membangkitkan motivasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan.
 - d. Membantu TPK dalam pembentukan tim pemelihara dan kelompok pemeliharaan.

- e. Memantau hasil dan operasional kegiatan serta kondisi kegiatan prasarana yang telah dibangun terutama bagian mana yang membutuhkan pemeliharaan.
- f. Memfasilitasi proses pemeliharaan terhadap sarana yang dibangun.

II. Gambaran Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi rumah tangga miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. (SPP).

Pengertian dana bergulir adalah seluruh program bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan dari kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.
2. Pelerstarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.
3. Peningkatana kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan.

4. Menyiapkan kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dan bergulir adalah Kelompok Simpan Pinjam yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu kelompok yang mempunyai kegiatan usaha yang dikelola secara bersama oleh anggota kelompok dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.

Gambaran kegiatan SPP yang dijabarkan dalam penjelasan PTO PNPM Mandiri Perdesaan 2009 adalah, Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Tujuan khusus kegiatan ini adalah :

- a. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b. Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
- c. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

2. Ketentuan Dasar dan Pendanaan BLM

a. Ketentuan Dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa sarat agunan.
- 2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, sertiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehing meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

- 5) Akuntabilitas, dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

b. Ketentuan Pendanaa BLM

Dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.

1) Sasaran Program

Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

3) Ketentuan Kelompok SPP

- a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya selama satu tahun.
- b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.

- c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Mekanisme pengelolaan kegiatan SPP adalah sebagai berikut :

1. MAD Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi Ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP dilakukan sehingga pelaku-pelaku program tingkat kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan; Camat dan staf terkait wakil dari instansi sektoral yang berada di kecamatan, para kepala desa, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), wakil RTM dari setiap desa, wakil perempuan dari setiap desa, Komite Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas), Tokoh masyarakat, Tokoh agama dan anggota masyarakat lainnya yang berniat untuk hadir.

2. Mudes Sosialisasi.

Pelaksanaan sosialisai di tingkat desa dimana pelaku-pelaku di tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan. Peserta : Kepala Desa dan aparat desa, BPD atau sebutan lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Wakil RTM Desa, Wakil perempuan, LSM/Ormas, Tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Pada

tahap ini dilakukan pemilihan dan penetapan terhadap KPM D/K dan PL.

3. Musyawara Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawara di dusun/kampung

- a. Identifikasi kelompok sesuai ketentuan kelompok SPP termasuk kondisi anggota. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari kelompok : kelompok pemula, kelompok berkembang dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan jadi pemanfaat.
- b. Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitas untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.

c. Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri

1. Daftar kelompok yang diidentifikasi
2. Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan
3. Peta sosial dan rumah tangga miskin
4. Rekap kebutuhan pemanfaat

Pada tahap Musyawara Dusun ini ditetapkan juga Peta Sosial yang didalamnya dirumuskan tentang Pola Rumah Tangga Miskin (RTM)

berdasarkan kriteria : kondisi rumah, kondisi penghuni rumah, kemampuan memenuhi kebutuhan.

4. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat Desa adalah :

- a. Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan Desa untuk kegiatan SPP.
- b. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan Desa.
- c. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang akan dikompertisikan ditingkat kecamatan.
- d. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :
 1. Sekilas kondisi kelompok
 2. Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
 3. Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.

Peserta : wakil-wakil perempuan dari dusun-dusun, wakil-wakil dari kelompok perempuan yang ada di desa dan perempuan desa lainnya yang berminat untuk hadir.

5. Verifikasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

a. Penetapan Formulir Verifikasi

Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (Capital, Assets, Management, Earning dan Liquidity) yaitu penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

b. Proses Pelaksanaan Verifikasi

1. Pengalaman kegiatan simpan pinjam.
2. Persyaratan kelompok.
3. Kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian ; Permodalan, Kualitas Pinjaman, Administrasi dan Pengelolaan, Pendapatan, Likuiditas (pendanaan jangka panjang).
4. Penilaian khusus rencana kegiatan.

5. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin.

6. Penilaian kategorisasi kelompok,

Kategorisasi tingkat perkembangan kelompok dinilai berdasarkan 6 indikator yaitu : ikatan pemersatu, kegiatan anggota untuk tujuan bersama, pengurus, aturan kelompok, iuran anggota, administrasi kelompok. Berdasarkan indikator tersebut kelompok dinilai dengan nilai berkisar dari nilai terendah yaitu angka 1 sampai dengan nilai tertinggi yaitu angka 4.

Dengan memperhatikan indikator tersebut dan nilai total dari setiap indikator maka kelompok dapat dikategorisasi menjadi :

- a. Kelompok pemula, jika nilai total indikator sampai 9 (sembilan)
- b. Kelompok berkembang, jika nilai total indikator antara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas).
- c. Kelompok siap/matang, jika nilai total indikator diatas 18 (delapan belas).
- d. Pembuatan Berita Acara (BA) hasil verifikasi, dalam BA tersebut mencantumkan rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran,

keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat dan kategorisasi perkembangan kelompok.

Tabel 4.1. Indikator Perkembangan Kelompok SPP

INDIKATOR PERKEMBANGAN KELOMPOK SPP				
INDIKATOR	NILAI = 1	NILAI = 2	NILAI = 3	NILAI = 4
Ikatan Pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili/geografis/keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan/ekonomi/simpan pinjam kurang dari 1 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara 1 tahun – 3 tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari 3 tahun
Kegiatan Anggota untuk Tujuan Bersama	Belum mempunyai kegiatan secara rutin	Mempunyai kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan terencana dengan baik
Aturan Kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD/ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib/tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
Administrasi Kelompok	Belum mempunyai administrasi secara tertulis	Mempunyai administrasi secara tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	Mempunyai administrasi secara tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggungjawabkan	Mempunyai administrasi secara tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggungjawabkan

Sumber : Penjelasan IV PTO PNPM Mandiri Pedesaan (h.60)

6. MAD Prioritas Pertama

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditakankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

Dalam tahapan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM terpenuhi.

Pemeringkatan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa.

Hasil pemeringkatan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLN. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM, tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya : KTP dan perjanjian pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan :

- a. Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat
- b. Kategori tingkat perkembangan kelompok
- c. Hasil penilaian kelayakan kelompok pengurus dituangkan dalam berita acara tim verifikasi.
- d. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha/

Peserta : Camat dan staf terkait, Instansi dinas terkait tingkat kecamatan, Tim pengamat, 6 (enam) orang wakil per desa : kepala desa, ketua tim pelaksana dan 4 (empat) orang wakil masyarakat, calon pengurus UPK, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

7. MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi Kecamatan yang telah menerima dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

Peserta : Camat dan staf terkait, Ketua dan Sekretaris MAD, Instansi dinas terkait tingkat kecamatan, Tim pengamat, 6 (enam) orang wakil per desa : kepala desa, ketua tim pelaksana dan 4 (empat) orang wakil masyarakat, pengurus UPK, Seluruh KPMD, anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.

8. Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :

- a. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan : besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau menetap.
- b. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan
- c. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK

9. Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana BLM sebagai berikut :

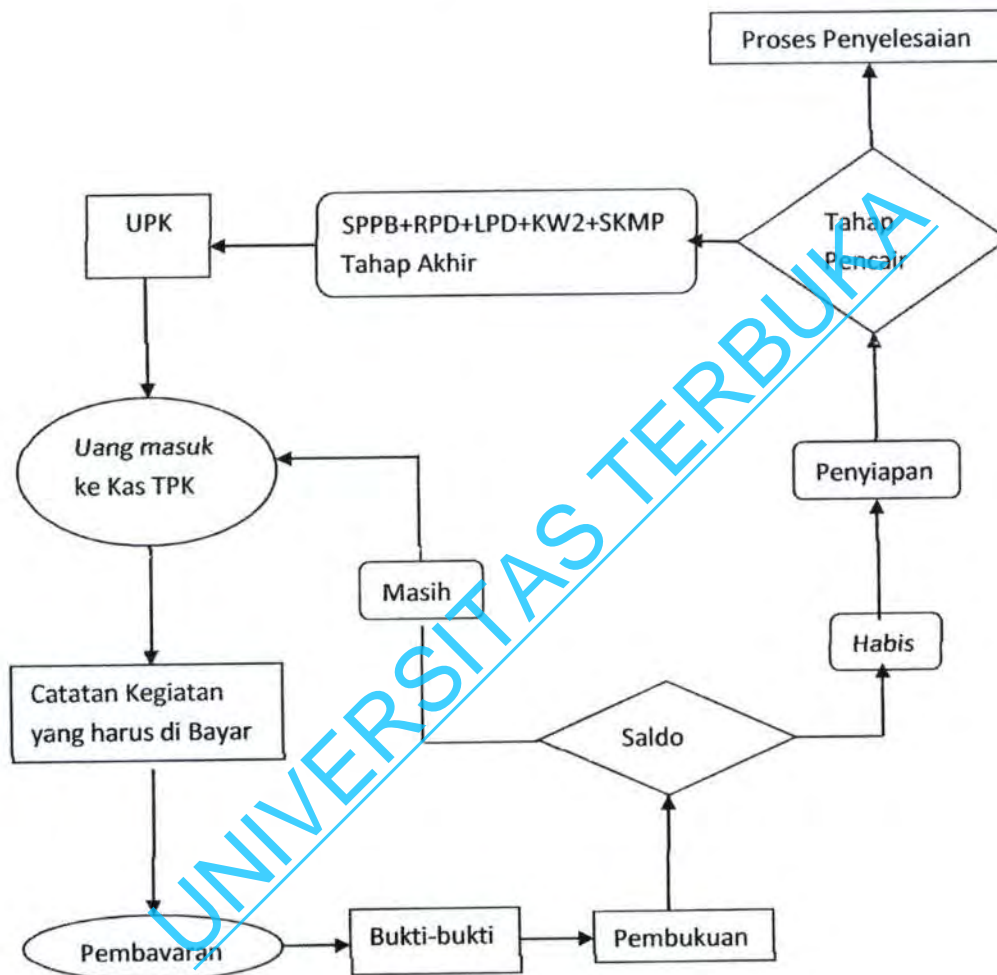
- a. Pencairan melalui desa dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran

- b. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
- c. Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2 % dan operasional desa 3 % dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- d. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerima dana.
- e. Kelompok menyerahkan kuitansi/ tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

UNIVERSITAS TERBUKA

Alur pencairan dana dari UPK sampai ke kelompok SPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.1. Mekanisme pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK



Sumber : Penjelasan IX PTO PNPM Mandiri Pedesaan (hal. 11)

10. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi :

- a. Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut : pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanafaat,

pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyaluran : kuitansi dan SPPB.

- b. Pengelolaan administrasi meliputi : rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP dan kartu pinjaman.
- c. Pengelolaan pelaporan sebagai berikut : laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman SPP, laporan kolektibilitas SPP, neraca dan laporan operasional.

11. Pengelolaan Dokumen dan Adminstrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi : data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/ kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

12. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

13. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup :

a. Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah

1. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
2. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri – Pedesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.
3. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan maupun kelembagaan kelompok.
4. Pengembangan layanan kepada masyarakat
5. Pengembangan permodalan

b. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai

lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.

B. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Kecamatan Lewolema adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Bunga yang merupakan inisiatif masyarakat rumpun Lewolema, untuk mendapat pelayanan yang lebih cepat, efisien dan efektif. Dasar hukum pembentukan kecamatan Lewolema adalah Peraturan daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang pembentukan kecamatan Demon Pagong, Lewolema, Ile Bura, Adonara, dan Adonara tengah yang diresmikan oleh Bupati flores Timur pada tanggal 08 Februari 2007 dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Kawaliwu yang terletak di Desa Sinar Hading. Lokasi penelitian

1. Letak Geografis, Topologi

Kecamatan Lewolema terletak diwilayah suku Lewolema dan berbatasan dengan:

Utara	: Teluk Hading
Timur	: Kecamatan tanjung Bunga
Selatan	: Kecamatan Larantuka dan Ile Mandiri
Barat	: Kecamatan demon pagong

Kondisi Topologi adalah Gunung dan berbukit dengan beberapa faktor yaitu:

- Kemiringan lebih dari 40°

- Ketinggian 10 – 150 m dari permukaan air laut
- Struktur Tanah yang bervariasi.
- Luas wilayah kecamatan Lewolema adalah 108,61km² dengan

perincian :

1. Lewobebe	: 7,45km ²
2. Ile Padung	: 22,35km ²
3. Sinar Hading	: 19,22km ²
4. Riang Kotek	: 7,65km ²
5. Bantala	: 15,42km ²
6. Painapang	: 19,22km ²
7. Baluk Hering	: 17,30km ²
8. Jumlah	: 108,61km²

Letak geografis lokasi penelitian dapat dilihat lebih lanjut pada lampiran Tugas Akhir Program Magister ini.

2. Demografi

Untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang penduduk di Kecamatan Lewolema pada umumnya dan desa lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2. Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin

No	Desa	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Lewobebe	138	286	369
2	Ile Padung	528	597	1.125
3	Bantala	727	737	1.464
4	Riang Kotek	456	452	908
5	Sinar Hading	582	654	1.236
6	Painapang	605	613	1.218
7	Baluk hering	812	858	1.670
8	Jumlah	3.893	4.097	7.990

Sumber : Lewolema dalam Angka 2012

Gambaran tentang Rumah Tangga Miskin (RTM) dan penduduk miskin di Kecamatan Lewolema khususnya desa penelitian dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3. Jumlah Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga Miskin

No	Desa	RT	RT Miskin	Anggota RT Miskin
1	Lewobebe	97	42	175
2	Ile Padung	265	71	217
3	Bantala	337	101	400
4	Riang Kotek	204	39	150
5	Sinar Hading	278	85	381
6	Painapang	252	70	277
7	Balukhering	395	92	360
8	Jumlah	1.828	500	1.960

Sumber : Lewolema dalam Angka 2012

Jumlah Rumah Tangga Miskin seperti terlihat pada tabel 4.2 di atas menurut Kepala Desa Balukhering (A. Koten Karolus) menyangsikan data tersebut, menurut dia :

“Jumlah penduduk desa Balukhering sebanyak **1.670** boleh dikatakan rata-rata semuanya miskin karena sekitar 90% penduduk di sini dengan mata pencaharian sebagai petani yang hasil panennya bergantung pada alam atau curah hujan, ketika kami mendapat jatah Raskin (beras untuk Keluarga Miskin) hanya untuk 92 rumah tangga dari 395 rumah tangga, mau bilang apa ? Tapi kebijakan saya tempuh ketika pembagian beras raskin, saya bagi rata untuk semua warga”. (AKK, Mei 2013)



Gambar 4.2: Wawancara dengan Kades Balukhering (Mei 2013)

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Sinar Hading yang mengatakan bahwa :

“Penduduk di desa ini hampir semuanya miskin. Mata pencaharian rata-rata adalah petani, nelayan, ojek dan sebagian kecil pegawai, guru dan pengusaha yang bisa hitung pakai jari. Ketika beras raskin datang, saya bagi rata untuk semua penduduk. Jika tidak maka akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa”. (NSL, Mei 2013)

Pada kesempatan lain Kepala Desa Sinar Hading menjelaskan tentang penduduk miskin di desanya bahwa :

“Kebanyakan penduduk di sini pergi merantau ke Malaysia mencari uang di sana untuk dapat membangun rumah dan membiayai pendidikan keluarga mereka, karena hanya bergantung pada pendapatan sebagai petani atau nelayan saja, mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan dan membangun rumah” (NSL, Juni 2013).

C. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan

kemudahan bagi rumah tangga miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. (SPP).

Menurut Fasilitator Kecamatan dalam diskusi dengan peneliti mengatakan bahwa :

“ Pada awal Program PNPM-MP yaitu tahun 2009 hadir di Kecamatan Lewolema saya dan PJOK Kecamatan Lewolema mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan se-kecamatan Lewolema untuk melakukan sosialisasi tentang PNPM-MP yang di dalamnya termasuk kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO), Selanjutnya Camat memfasilitasi pembentukan Organisasi Pelaksana Program di tingkat Kecamatan. Setelah Pelaksana program di tingkat Kecamatan terbentuk, kami melakukan sosialisasi di semua desa di kecamatan ini” (SLT, Mei 2013).

Masyarakat di Kecamatan Lewolema pada umumnya dan desa Balukhering serta desa Sinar Hading pada khususnya Mengetahui tentang Program PNPM-MP melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Lewolema dalam forum Musyawarah Antar Desa Sosialisasi (MAD Sos). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Balukhering bahwa :

“Masyarakat di desa ini mengetahui tentang program PNPM-MP yang di dalamnya ada SPP lewat Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Fasilitator Kecamatan (FK) dalam forum MAD Sos. Setelah Mengerti tentang program tersebut, Masyarakat antusias khususnya kaum perempuan untuk membentuk Kelompok SPP. Jadi rata-rata kelompok SPP di desa ini dibentuk karena ada Program PNPM ini” (AKK, Mei 2013)

Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Desa Sinar Hading yang mengatakan bahwa:

“Setelah masyarakat di desa Sinar Hading memahami tentang program PNPM melalui MAD Sos, masyarakat senang dan antusias untuk membentuk kelompok SPP” (NSL, Mei 2013)

Melalui Musyawarah Khusus Perempuan terbentuk 10 Kelompok SPP di desa Baluk Hering dan 9 Kelompok SPP di desa Sinar Hading pada tahun 2009. Perkembangan SPP pada dua desa tersebut cukup baik dan sehat maka pada tahun-tahun berikut terbentuk kelompok SPP baru, hingga pada akhir tahun 2012 telah terbentuk 21 Kelompok SPP di Desa Baluk Hering dan 29 Kelompok SPP di Desa Sinar Hading.

Fasilitator Kecamatan lebih lanjut menjelaskan bahwa :

“Semua Kelompok SPP di kecamatan ini terbentuk melalui Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) termasuk 21 Kelompok SPP di desa Balukhering dan 29 Kelompok di desa Sinar Hading. Proses selanjutnya Kelompok mengajukan proposal Kepada UPK yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan program”,(SLT,Mei 2013)



Gambar 4.3 Musyawarah Khusus Perempuan (Mei 2009)

Kelompok SPP dan besarnya realisasi pinjaman di desa Balukhering dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.4 : Data Kelompok SPP, Besarnya Pinjaman dan Realisasi pinjaman Kelompok SPP Desa Balukhering

NO	KELOMPOK	Jml Pemanfaat (Anggota)	ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN (TGL/BLN/THN)
1	2		3	4
1	Restu Lewo	10	11,500,000.00	13/11/09
2	Melati	11	11,500,000.00	13/11/09
3	Kamboja	6	4,000,000.00	13/11/09
4	Peten Wekit	6	8,000,000.00	13/11/09
5	St. Elisabeth	10	30,000,000.00	13/11/09
6	Anggrek	7	3,500,000.00	13/11/09
7	Mekar Sari	7	5,000,000.00	13/11/09
8	PMRK	5	14,500,000.00	13/11/09
9	BLM 2010		0	
10	Kasih	8	25,000,000.00	16/8/2010
11	Krisno sonata	8	35,000,000.00	16/8/2010
12	Perguliran 2010 1		0	
13	Desa Baluk Hering		0	
14	1.Kelompok Anggrek I	9	25,000,000.00	20/12/2010
15	2.Kelompok Kamboja	5	17,500,000.00	20/12/2010
16	3.Kelompok Mekar Sari	4	13,000,000.00	20/12/2010
17	4.Kelompok Ave Stella maris	5	13,500,000.00	20/12/2010
18	5.Kelompok Melati	5	15,500,000.00	20/12/2010
19	6.Kelompok Sejaterah	10	10,000,000.00	20/12/2010
20	7.Kelompok TITE Hena	8	16,500,000.00	20/12/2010
21	8.Kelompok Ina Ana	5	8,500,000.00	20/12/2010
22	9.Kelompok Dahlia	5	8,500,000.00	20/12/2010
23	10.Kelompok Pile PUPU	5	12,000,000.00	20/12/2010
24	1.Kelompok ST Elisabeth	6	25,000,000.00	3/17/2011
25	1.Kelompok PMRK	6	25,000,000.00	3/17/2011
	Gulir III		0	
	1.Kamelia	5	11,000,000.00	20/12/2010
	2.Nangka	5	20,000,000.00	20/12/2010
	3.Restu Lewo	7	22,000,000.00	20/12/2010
	BLM 2011			
	Anggrek II	5	26,000,000.00	20/12/2010
	2.Remaja Putra	6	17,000,000.00	20/12/2010
	3.Tite Hena II	5	15,000,000.00	20/12/2010
	4.Mawar	5	15,000,000.00	20/12/2010

1	2		3	4
	BLM 2012		0	
	1.KAMBOJA II	6	20,000,000.00	3/5/2012
	2.KAMBOJA III	5	9,000,000.00	3/5/2012
	Gair 1 2012		0	
	1.RESTU LEWO II	5	14,000,000.00	3/5/2012
	2.MELISA	6	18,500,000.00	3/5/2012
	3.PETEN WEKIT II	5	17,000,000.00	3/5/2012
	4.CAHAYA	5	16,000,000.00	3/5/2012
			0	
			0	
	151	558,500,000		

Sumber: UPK Kecamatan Lewolema

Sedangkan Kelompok SPP dan besarnya realisasi pinjaman di desa Sinar Hading dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5 ; Daftar Kelompok, Alokasi Pinjaman dan Realisasi Pinjaman Desa Sinar Hading

NO	KELOMPOK	Jumlah Peminfaat (Anggota)	ALOKASI PINJAMAN	REALISASI PINJAMAN (TGL/BLN/THN)
1	2	3	4	5
1	Flamboyan	5	10,000,000	12/11/2009
2	Mawar	10	10,000,000	12/11/2009
3	Cilik	5	12,500,000	12/11/2009
4	Kenari	6	11,000,000	12/11/2009
5	Melati	7	14,000,000	12/11/2009
6	Ibu Kota	10	11,000,000	12/11/2009
7	Avila Jaya I	10	11,000,000	12/11/2009
8	Anggrek	10	20,000,000	12/11/2009
9	Avila Jaya II	8	19,500,000	12/11/2009
10				
11	BLM 2010			
12	Patimura	10	12,500,000	10/8/2010
13	Bunga Nata	13	37,000,000	10/8/2010
14	Perguliran 2010 I			
15	Kenari	8	22,000,000	12/20/2010
16	Cilik	7	16,500,000	12/20/2010
17	Ibu Kota	10	12,500,000	12/20/2010
18	Melati	8	16,500,000	12/20/2010
19	Avilla Jaya I	9	13,500,000	12/20/2010
20	Anggrek	9	13,500,000	12/20/2010
21	Avila Jaya II	10	20,000,000	12/20/2010

1	2	3	4	5
22	Flamboyan	6	15,500,000	12/20/2010
23	BLM 2011			
24	Mawar	9	15,000,000	12/7/2011
25	Kamboja	5	9,000,000	12/7/2011
26	Pelangi	5	8,500,000	12/7/2011
27	Dore bera	8	13,500,000	12/7/2011
28	PERGULIRAN IV 2011			
29	Patimura	10	27,000,000	11/8/2011
30	Bunga Nata I	13	45,000,000	11/8/2011
31	Bunga Nata II	10	24,500,000	11/8/2011
	BLM 2012			
	1.PERMATA	9	24,000,000	4/6/2012
	ABATAWA	10	24,000,000	4/6/2012
	LEMAHLEMBUT	9	22,125,000	4/6/2012
32	Guir 1 2012			
33	1.AJINEBO	10	28,000,000	4/6/2012
34	DEKAHARUT	10	28,500,000	4/6/2012
35	TELUKHADING	10	25,000,000	4/6/2012
	Gulir VI 2012			
	1.Kenari	7	29,000,000	3/10/2012
	2.Cilik	4	15,000,000	3/11/2012
	3.Ibu Kota	7	23,000,000	3/12/2012
	4.Melati	6	12,000,000	3/13/2012
	5.Avilla jaya I	9	30,000,000	3/14/2012
	6.Angrek	10	29,000,000	3/15/2012
	7.Avilla Jaya II	4	10,000,000	3/16/2012
	8.Flamboyan	6	24,000,000	3/17/2012
	9.Mawar	9	31,000,000	3/18/2012
	10.Kamboja	5	14,000,000	3/19/2012
	11.Pelangi	6	26,000,000	3/20/2012
	12.Doro Bera	8	26,000,000	3/21/2012
	GULIR VI 2012 TAHAP II			
	1.Kenari	1	5,000,000	10/12/2012
	2.Cilik	3	15,000,000	10/12/2010
	3.Melati	2	10,000,000	10/12/2010
	4.Doro Bera	1	5,000,000	10/12/2010
	5. Avilla Jaya II	6	30,000,000	10/12/2010
TOTAL				
L		373	926,625,000	

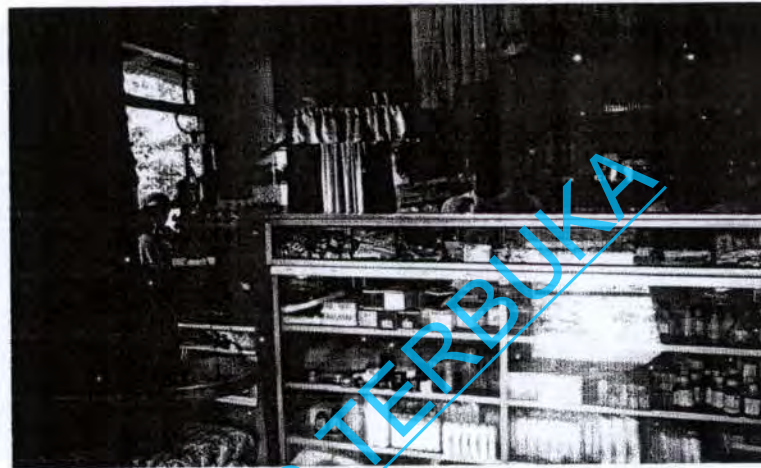
Sumber : UPK Kecamatan Lewolema

D. Profil Usaha anggota Kelompok SPP

a. Desa Baluk Hering

1. Ibu KSR. Anggota Kelompok Remaja Putra, berpendidikan SLTA, membuka usaha perkiosan dan penimbangan hasil komoditi masyarakat. Melalui Kelompok ia meminjam uang

sebanyak Rp.17.000.000,- pada tahun 2011. Kelompok ini mempunyai anggota sebanyak 6 orang dengan total pinjaman Kelompok pada UPK sebesar RP. 17.000.000,00. Cicilan ke UPK sudah lunas.



Gambar 4.4. Kios milik KSR (Mei 2013)

2. Ibu APK, Anggota Kelompok Stelamaris berpendidikan SD membuka usaha Ojek Motor untuk suaminya. Melalui kelompok ia meminjam Rp. 6.000.000,- pada tahun 2010 dan masih menunggak sampai dengan akhir tahun 2012. Kelompok tersebut memiliki anggota sebanyak 5 orang dengan total pinjaman kelompok sebesar RP. 13.500.000,-
3. Ibu UK anggota kelompok Kamboja pendidikan SD, usaha ternak babi dengan besarnya pinjaman Rp. 1.500.000,- dari pinjaman kelompok sebesar Rp. 4.000.000,- yang beranggotakan 6 orang. Cicilan masih menunggak sampai sekarang.

4. Ibu AWK, anggota kelompok Anggrek berpendidikan SD, tidak ada usaha, meminjam uang untuk biaya pemasangan listrik (PLN) sebesar RP. 3.000.000,- pinjam pada tahun 2009 dan sudah lunas.
5. Ibu SNW Anggota kelompok Anggrek, berpendidikan SLTA membuka usaha perkiosan. Pinjam tahap I sebesar RP. 3.500.000,- tahun 2009 dan tahap II tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- dan sudah lunas cicilan.
6. Ibu MLM, Anggota kelompok Melati tidak memiliki usaha meminjam sebesar RP. 2.000.000,- untuk biaya pemasangan listrik (PLN) pinjam pada tahun 2009 dan sudah lunas.
7. Ibu YD, anggota kelompok Kenari berpendidikan SLTP pada awal meminjam uang dari kelompok membuka usaha beternak ayam potong dengan besarnya pinjaman sebanyak RP. 10.000.000,- sudah lunas cicilan
8. Ibu YR, anggota kelompok Pelangi pendidikan SD dengan jenis usaha membuat minyak kelapa untuk dijual, meminjam pada kelompok sebesar Rp.2.000.000,- pada tahun 2011 dan cicilan sudah lunas.
9. Ibu ABP anggota kelompok PMRK pendidikan SD, meminjam pada kelompok sebesar RP. 25.000.000,- pada tahun 2010 untuk usaha membuat kasur, telah mencicil sebesar Rp. 10.000.000.- dan menunggak sebesar Rp. 15.000.000.-



Gambar 4.5. Wawancara dengan ibu ABP (mei 2013)

10. Ibu AYR, Ketua Kelompok Krisno Sonata, Suaminya seorang pengusaha, memiliki anggota sebanyak 7 orang dengan usaha penangkaran benih/bibit kehutanan dan perkebunan yang dijalankan oleh suaminya, meminjam pada tahun 2010 sebesar RP. 35.000.000... telah mencicil Rp. 4.000.000,- sisanya masih menunggak



Gambar 4.6. Usaha Suami AYR (Mei 2013)

b. Desa Sinar Hading.

1. Ibu AGT. Ketua Kelompok Ibu Kota , berpendidikan SLTA, membuka usaha Tenun Ikat, Melalui Kelompok ia meminjam uang sebanyak Rp.12.500.000,- pada tahun 2009. Kelompok ini mempunyai anggota sebanyak 10 orang dimana usaha dijalankan secara kelompok. Cicilan ke UPK sudah lunas.



Gambar 4.7. Kelompok Tenun Ikat Ibu Kota (Mei 2013)

2. Ibu APT, Anggota Kelompok Flamboyan berpendidikan SD membuka usaha bakulan ikan . Melalui kelompok ia meminjam Rp. 6.000.000,- pada tahun 2009 dan cicilan sudah dilunaskan ke UPK.
3. Ibu YK anggota kelompok Avila Jaya pendidikan SD, usaha perkiosan dengan besarnya pinjaman tahap I Rp. 4.000.000,- pada tahun 2009, pada tahap II tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- tahap I dan II sudah dilunaskan.

4. Ibu IWR, anggota kelompok Anggrek berpendidikan SD, mempunyai usaha Parut Kelapa, meminjam uang RP. 5.000.000,- pinjam pada tahun 2009 dan sudah lunas.
5. Ibu SNW Anggota kelompok Permata, berpendidikan SLTA membuka usaha perkiosan. Pinjam tahap I sebesar RP. 5.000.000,- tahun 2009 dan tahap II tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- dan sudah lunas cicilan.
6. Ibu ALR, Anggota kelompok Kenari memiliki Pendidikan SLTA, jenis usaha menjual pulsa, meminjam sebesar RP. 2.000.000,- pinjam pada tahun 2009 dan sudah lunas.
7. Ibu AR, anggota kelompok Pelangi berpendidikan SLTP pada awal meminjam uang dari kelompok membuka usaha beternak babi dengan besarnya pinjaman sebanyak RP. 2.000.000,- cicilan sudah lunas.



Gambar 4.8. ternak babi ibu AR (Mei 2013)

8. Ibu YR, anggota kelompok Kasih Pendidikan SD dengan jenis usaha membuat minyak kelapa untuk dijual, meminjam pada kelompok sebesar Rp.2.000.000,- pada tahun 2011 dan cicilan masih menunggak.
9. Ibu ABP anggota kelompok Bunga Natal pendidikan SLTP, meminjam pada kelompok sebesar RP. 37.000.000,- pada tahun 2010 untuk usaha Rumpon Ikan, telah lunas mencicil.
10. Ibu AYR, Ketua Kelompok Bunga Natal mempunyai usaha yang dijalankan oleh suaminya, yaitu penangkapan ikan *gill net* meminjam pada tahun 2010 sebesar RP. 40.000.000.-, telah lunas mencicil

E. Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Kegiatan SPP

Sebagaimana tujuan dilaksanakannya evaluasi pada penelitian ini yang sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan SPP terlebih khusus yaitu tujuan jangka menengah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka beberapa hal penting yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar

Pemenuhan akan kebutuhan dalam mendanai usaha maupun sosial dasar merupakan salah satu tujuan yang ingin dipenuhi dalam kegiatan SPP. Terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan sosial dasar para anggota SPP, maka perlu untuk mencermati pelaksanaan pendanaan dari tahap

pencairan dana dan pengembalian dana, yang merupakan *strategy objective* dalam pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP.

Terkait dengan pencairan dana ke Kelompok SPP dijelaskan oleh Fasilitator Kecamatan, SLT sebagai berikut :

“Setelah Proposal usaha yang diajukan oleh Kelompok SPP masuk ke UPK Kecamatan, Tim verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, setelah dinyatakan layak, proposal-proposal kelompok tersebut dibawa ke forum Musyawarah Antar Desa Perencanaan (MAD-Perencanaan), dalam forum tersebut kelompok SPP dari setiap desa mendapat perengkingan (prioritas) untuk mendapatkan dana pada Forum MAD-Pendanaan. Selanjutnya kami bersama dengan Ketua dan Bendahara UPK melakukan Pencairan pada Bank, setelah itu kita melakukan penyerahan kepada kelompok SPP di desa melalui TPK, TPK menyerahkan kepada Kelompok melalui ketua dan bendahara kelompok, ketua dan bendahara menyerahkan kepada masing masing anggota kelompok sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh anggota kepada kelompok”. (SLT, Mei 2013)

Pernyataan tersebut didukung oleh ketua UPK Kecamatan Lewolema, AB mengatakan bahwa :

“Setelah kami melakukan pencairan di Bank bersama dengan FK, kami bersama-sama turun ke desa untuk menyerahkan dana tersebut ke Kelompok Melalui TPK di desa yang bersangkutan, di hadapan TPK dan anggota kelompok SPP sebelum dana itu di serahkan, kami langsung melakukan pemotongan untuk operasional UPK 2% dan TPK 3% sesuai dengan PTO PNPM”. (AB, Mei 2013)

Terkait dengan Pendanaan dan pengembalian dana bergulir dari kelompok ke UPK di Kecamatan Lewolema khususnya di desa Balukhering dan desa Sinar Hading, ketua UPK Kecamatan Lewolema AB mengatakan bahwa :

“Jumlah kelompok SPP di desa Balukhering sampai akhir 2012 sebanyak 21 kelompok dengan jumlah anggota pemanfaat sebanyak 151 orang. Alokasi dana SPP sebesar RP.558.000.000,-. Kegiatan SPP di desa Balukhering tidak berjalan dengan lancar dan mengalami kemacetan dengan tingkat pengembalian baru mencapai 78,6 %. Dari prosentase pengembalian ini, maka tingkat pengembalian tidak mencapai Standar Kinerja Nasional (KSN) dimana harus mencapai 95 %. Desa Balukhering adalah merupakan desa penunggak terbesar untuk Kecamatan Lewolema.

Akibat dari tunggakan pengembalian tersebut, maka desa Balukhering dikenakan sanksi lokal untuk tidak mendapat alokasi dana PNPM. Sementara untuk desa Sinar Hading dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah kelompok SPP mencapai 29 kelompok dengan jumlah anggota 373 orang. Kegiatan SPP di desa Sinar Hading pada umumnya berjalan dengan baik dan menjadi salah satu desa contoh untuk kecamatan Lewolema. Alokasi dana SPP untuk desa Sinar Hading sebesar RP. 926.625.000,- dengan tingkat pengembalian sebesar 95,2 % dan mencapai Standar Kinerja Nasional (SKN)", (AB, Juni 2013).

a. Temuan Lapangan di desa Balukhering

Temuan lapangan di desa Balukhering terdapat beberapa hal, bahwa ada 6 orang ibu di desa Balukhering yang tergabung dalam kelompok, namun tidak menerima dana dari kelompok, dana tersebut dikelola sendiri oleh ketua kelompok. Kelompok hanya merupakan formalitas saja. Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Desa Baluk Hering bahwa :

"Ada kelompok SPP di desa ini yang hanya secara formalitas dibentuk kelompok, namun dananya digunakan sendiri untuk usaha perkiosan dan membeli hasil komoditi masyarakat seperti kopra dan mete. Usahanya berkembang pesat sehingga dapat membeli dua *puck up* . Saya heran apakah tim verifikasi tidak melakukan verifikasi lapangan dan ketika pengajuan proposal ke UPK Kecamatan apakah hanya melakukan verifikasi administrasi saja? Kelemahan lain adalah pada saat tim verifikasi lapangan kita pemerintah desa tidak dilibatkan karena kami tau kelompok mana kelompok yang mempunyai usaha dan mana yang merupakan kelompok dadakan, demikian juga dengan anggota kelompok. Kami tau masyarakat kami mana yang betul-betul punya usaha dan mana yang tidak, ada juga yang pinjam uang untuk buat persta anak sambut baru, saat pengembalian baru cari uang dari sumber lain untuk mencicil, sehingga di desa ini banyak sekali terjadi kredit macet" (VT, Mei 20013).

Pada kesempatan lain sekretaris desa Balukhering mengatakan bahwa :

"Ada penerima manfaat program disini yang bukan dikategorikan keluarga miskin, setahu saya sasaran program SPP PNPM ini adalah untuk keluarga miskin. Akibatnya yang kaya akan tetap kaya dan yang miskin tetap miskin".(VT, Juni 2013)

Pernyataan sekretaris desa ini diakui PJOK Kecamatan lewolema bahwa :

"Program PNPM-MP ini masuk dikecamatan Lewolema sekitar bulan Maret 2009. Pada bulan-bulan selanjutnya kita masih melakukan

sosialisasi, pembentukan pelaku di tingkat kecamatan dan desa serta mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pelaku, sehingga pencairan baik SPP maupun non SPP baru dapat dilakukan sekitar bulan Oktober-Nopember 2009. Hal ini berpengaruh terhadap proses pelaksanaan Pencairan dana yang kurang memperhatikan ketentuan program”,(PK,Juni 2013)

KSR, selaku Ketua Kelompok mengatakan bahwa :

“Kelompok yang saya bentuk beranggotakan keluarga dekat, dan anggota keluarga tersebut merelakan dana ini untuk saya kelolah, dan usaha ini merupakan usaha keluarga. Yang penting setoran cicilan lancar dan sudah lunas ko”. (KSR Mei 2013)

Ditemukan di lapangan juga bahwa ada satu kelompok SPP yang beranggotakan 7 orang dengan usaha penangkaran benih/bibit kehutanan dan perkebunan. Yang bersangkutan adalah seorang tokoh dalam desa. Dalam perjalanan baru diketahui bahwa kelompok tersebut adalah sebuah perusahaan (CV). Menurut Ketua UPK yang juga adalah warga desa Balukhering menceritakan :

“Ada satu kelompok dengan usaha penangkaran benih/bibit kehutanan dan perkebunan yang beranggotakan 7 orang yang merupakan keluarga dekat meminjam dana pada UPK sebesar RP.35.000.000,- pada tahun 2010 dan baru setor cicilan pada bulan pertama sebesar RP. 4.000.000,- ditambah bunga 1,1% dan jatuh tempo pengembalian pada bulan September 2011, sehingga terjadi kredit macet pada kelompok tersebut sebesar Rp.31.000.000,-Belakangan baru diketahui bahwa kelompok tersebut adalah sebuah perusahaan (CV). Beliau merupakan seorang tokoh dalam desa. Ini merupakan kelemahan kami pada saat Verifikasi”. (ARB,Mei 2013)

Suami ibu AYR menjelaskan bahwa :

“Terkait dengan Kelompok SPP yang diketuai oleh ibu saya itu hanya kesamaan nama kelompok dengan perusahaan yang saya pimpin. Ketika ibu meminjam uang pada UPK, perusahaan saya belum mendapat pekerjaan dari pemerintah, sehingga dengan dana tersebut kami sekeluarga mengerjakan usaha di bidang penangkaran benih/bibit kehutanan dan perkebunan seperti Mahoni, Jati, Cendana, mete, nangka, mangga dan kakao sambil melakukan lobi dengan pemerintah Kabupaten untuk membeli anakan tersebut sambil menjual kepada masyarakat, namun

kurang laku sehingga kami tidak mampu membayar tunggakan kredit di UPK PNPM”.(suami AYR,Mei 2013).

ABP Ketua kelompok PMRK pendidikan SD, meminjam pada kelompok sebesar RP. 25.000.000,- pada tahun 2010 untuk usaha membuat kasur, telah mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- dan menunggak sebesar Rp. 15.000.000 mengatakan bahwa:

“Saya meminjam di PNPM sebesar RP. 25.000.000,- untuk usaha pembuatan kasur, usaha ini maju-mundur pa, artinya kalau banyak permintaan akan kasur maka hasilnya lumayan, tapi kalau permintaan kurang atau tidak ada maka mau bilang apa, dan juga sangat tergantung bahan baku yaitu kapuk. Walau ada permintaan tetapi bahan baku tidak ada maka saya tidak bisa buat kasur. Sampai saat ini saya masi tunggak sebesar Rp. 25 000.000,-(ABP, Mei 2013)

Ketua UPK Kecamatan Lewolema yang juga merupakan warga desa Balukhering ARB mengatakan bahwa :

“Di desa Balukhering ada terdapat sekitar lima Kelompok yang dananya dikelolah sendiri oleh ketua kelompok, hal ini kami baru mengetahui ketika yang bersangkutan menyeter cicilan pertama, dimana ketika kami meminta bukti cicilan dari anggota, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti tersebut, dan mengaku bahwa dana pinjaman dari PNPM dikelolah sendiri. Kelompok tersebut adalah, Kelompok Krisno Sonata, Mekar Sari, Ave Stelamaris, PMRK dan Anggrek. Pada saat verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi kelompok itu ada dan ada anggotanya, tapi setelah pencairan dana, dana tersebut dipergunakan sendiri oleh ketua kelompok”. (ARB, Mei 2013)

YR, anggota kelompok Pelangi pendidikan SD dengan jenis usaha membuat minyak kelapa untuk dijual, meminjam pada kelompok sebesar Rp.2.000.000,- pada tahun 2011 dan cicilan sudah lunas mengatakan bahwa :

“Program PNPM ini cukup membantu modal kami untuk mengembangkan usaha dan prosedurnya tidak berbelit-belit seperti di bank, di PNPM kami hanya melengkapi foto copy KTP dan mengisi formulir saja untuk dilengkapi dalam proposal usulan. Pinjaman saya sudah lunas, saya mau pinjam lagi tapi desa kami kena sanksi karena kredit macet. Jadi kami mau pinjam lagi pada guliran berikut tidak bisa lagi, karena ketentuan PNPM begitu”. (YR,Mei 2013).

Senada dengan ibu YR, ibu YD anggota kelompok Kenari yang berpendidikan SLTP mengatakan bahwa :

“Program PNPM ini baik karena dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan untuk usaha ekonomi sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. Tahun 2009 saya pinjam uang di PNPM sebesar Rp. 10.000.000 untuk usaha beternak ayam potong, saya sudah lunaskan cicilan di PNPM. Sekarang saya tidak beternak ayam potong lagi karena sudah tidak ada modal untuk melakukan usaha, saya mau pinjam lagi di PNPM tapi tidak bisa karena menurut Ketua UPK yang juga adalah penduduk desa ini megatakan bhwa desa kami kena sanksi karena mengalami kredit macet”(YD,Mei 2013).

Ibu SNW anggota kelompok Anggrek, berpendidikan SLTA Meminjam Uang di PNPM dan membuka usaha perkiosan mengatakan bahwa :

“Proses pinjam uang di PNPM mudah yaitu kami beberapa ibu-ibu di RT ini membentuk kelompok SPP dan memenuhi persyaratan program, Fasilitator Kecamatan dan UPK datang menyerahkan uang kepada kami melalui kelompok yang disaksikan oleh TPK dan pemerintah desa. Saya pada tahap I tahun 2009 meminjam Rp. 3.500.000 untuk menambah usaha perkiosan saya dan saya sudah lunaskan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 saya pinjam lagi tahap II sebesar RP. 25.000.000,- untuk pengembangan usaha perkiosan saya, akhir tahun 2012 saya sudah lunaskan. Sekarang saya mau pinjam lagi tapi desa kami kena sanksi karena ada anggota kelompok Anggrek dan kelompok SPP di desa ini yang belum lunas mencicil di PNPM”(SNW,Mei 2013)



Gambar: 4.9. Kios ibu SNW (Mei 2013)

Ibu APK, Anggota Kelompok Stelamaris berpendidikan SD membuka usaha Ojek Motor untuk suaminya. Melalui kelompok ia meminjam Rp. 6.000.000,- pada tahun 2010 dan masih menunggak sampai dengan akhir tahun 2012. Mengatakan bahwa :

“Uang yang saya pinjam di PNPM lewat kelompok SPP Stelamaris saya pake untuk membayar uang muka motor (sepeda motor). Motor tersebut digunakan oleh suami saya untuk ojek, pendapatan dari ojek tersebut rata-rata sebesar Rp. 1.000.000 perbulan, tapi dari pendapatan tersebut kami harus mencicil kredit motor sebesar Rp. 750.000 perbulan, sisa Rp. 250.000 kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, itupun tidak cukup sehingga sampai sekarang saya masih menunggak cicilan di PNPM. Karena kehidupan ekonomi kami seperti itu maka tahun lalu suami saya pergi merantau ke Malaysia, mencari uang untuk membayar utang di PNPM tersebut.”(APK,Mei 2013).



Gambar: 4.10. Wawancara dengan ibu APK (Mei 2013)

Ibu UK anggota kelompok Kamboja berpendidikan SD, meminjam uang di PNPM untuk usaha beternak babi mengatakan bahwa :

“Pinjam Uang di PNPM memang tidak sulit jika dibandingkan dengan pinjam uang di Bank, tapi yang sulit adalah mengembalikan cicilan.

Memang tidak banyak yang saya pinjam, hanya RP. 1.500.000,- untuk beli anak babi 3 ekor, saya piara dan ketika sudah besar bersamaan dengan itu anak saya Sambut Baru, babi tersebut kami makan ketika persta anak saya sambut baru itu. Cicilan di PNPM belum saya lunaskan”(UK,Mei 2013).

Temuan lapangan di desa Baluhering terdapat dua orang anggota dari dua kelompok yaitu kelompok Anggrek dan kelompok Melati meminjam uang di PNPM-MP tidak digunakan untuk modal usaha, tetapi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga yaitu untuk biaya pemasangan Listrik (PLN). Hal tersebut disampaikan oleh ibu AWK bahwa :

“Pada tahun 2009 ada jaringan listrik PLN masuk di desa ini, pada saat itu kami tidak punya uang, saya bergabung di kelompok Anggrek agar saya juga dapat meminjam uang di PNPM, dimana biaya pemasangan listrik pada saat itu sebesar RP. 3.000.000,- dan saya pinjam di PNPM melalui Kelompok SPP Anggrek sebesar Rp. 3.000.000. Saya sudah lunaskan pinjaman tersebut dengan menjual hasil perkebunan kami yaitu kelapa dan mete)”. (AWK,Mei 2013).

Senada dengan pernyataan AWK tersebut, ibu MLM anggota kelompok Melati menyatakan bahwa :

“Waktu jaringan listrik PLN masuk di desa, saya berniat untuk memasang listri di rumah, tapi waktu itu uang kami hanya RP.1.000.000, sedangkan biaya pemasangan listrik waktu itu sebesar Rp.3.000.000,- lalu saya pinjam uang di PNPM melalui Kelompok SPP Melati dan menjadi anggota kelompok tersebut. Selanjutnya saya meminjam di PNPM sebesar Rp.2.000.000, untuk tambah biaya pemasangan listrik”(MLM,Mei 2013)

b. Temuan lapangan di desa Sinar Hading

Ibu AGT. Ketua Kelompok Ibu Kota, berpendidikan SLTA, membuka usaha Tenun Ikat, Melalui Kelompok ia meminjam uang sebanyak Rp.12.500.000,- pada tahun 2009. Kelompok ini mempunyai anggota sebanyak 10 orang dimana usaha dijalankan secara kelompok. Ibu AGT mengatakan bahwa:

“Sebelum Program PNPM-MP masuk di desa pada tahun 2009 kelompok tenun ikat Ibu Kota sudah terbentuk yakni kami bentuk pada tahun 2007

beranggotakan pada waktu itu sebanyak 5 orang ibu yang memiliki keterampilan tenun ikat, sekarang sudah tambah anggota sebanyak 10 orang. Setelah program PNPM ini masuk pada tahun 2009 dan ada bantuan modal usaha melalui SPP, maka kami mengajukan proposal ke UPK kecamatan untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi dan melengkapi persyaratan program kami diberi modal usaha oleh UPK sebesar Rp. 12.500.000. Dana tersebut kami membeli alat tenun ikat, bahan baku berupa kapas dan benang serta pewarna. Pengembalian kepada UPK telah kami lunaskan sejak tahun 2011 lalu".(AGT, Mei 2013)



Gambar 4.11. Kelompok Tenun Ikat Ibu Kota (Mei 2013)

Ibu APT, Anggota Kelompok Flamboyan berpendidikan SD membuka usaha bakulan ikan. Melalui kelompok ia meminjam Rp. 6.000.000,- pada tahun 2009 mengatakan:

“Pada tahun 2009 program PNPM masuk di desa memberikan kemudahan kepada kaum ibu-ibu mendapatkan modal usaha dengan mudah karena persyaratannya tidak sulit dan kantor UPK juga ada di dalam desa ini. Saya pinjam waktu itu sebanyak RP. 6.000.000,- untuk usaha bakulan jual ikan”. (APT, Mei 2013)

Ibu YK anggota kelompok Avila Jaya pendidikan SD, usaha perkiosan dengan besarnya pinjaman tahap I Rp. 4.000.000,- pada tahun 2009, pada tahap II

tahun 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- tahap I dan II sudah dilunaskan, mengatakan bahwa :

“Sebelum Program PNPM ini ada, saya hanya menjual rokok saja, saya berniat untuk mengembangkan usaha saya yaitu kios, tapi modal saya terbatas, untuk mendapatkan dana dari PNPM harus melalui kelompok, karena ketentuan program begitu, lalu kami beberapa ibu-ibu membentuk kelompok SPP dan mendapatkan bantuan modal usaha dari PNPM”.(YK,Mei 2013).

Ibu SNW Anggota kelompok Permata, berpendidikan SLTA membuka usaha perkiosan. Pinjam tahap I sebesar RP. 5.000.000,- tahun 2009 dan tahap II tahun 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- Mengatakan bahwa:

“Proses pinjam uang di PNPM mudah yaitu kami beberapa ibu-ibu di RT ini membentuk kelompok SPP, kami buat proposal dan memenuhi persyaratan program, Fasilitator Kecamatan dan UPK datang menyerahkan uang kepada kami melalui kelompok yang disaksikan oleh TPK dan pemerintah desa dengan bunga yang disepakati dalam forum MAD Kusus Perempuan menyepakati sebesar 1,1%. Saya pada tahap I tahun 2009 meminjam Rp. 5.000.000,- untuk menambah usaha perkiosan saya dan saya sudah lunaskan pada tahun 2010. Pada tahun 2011 saya pinjam lagi tahap II sebesar RP. 25.000.000,- untuk pengembangan usaha perkiosan saya, akhir tahun 2012 saya sudah lunaskan” (SNW,Mei 2013).

Temuan lapangan di desa Sinar Hading terdapat dua orang ibu yang tergabung dalam Kelompok SPP Bunga Natal meminjam uang di PNPM-MP mengembangkan usaha perikanan yang dikelola oleh suami mereka. Ibu ABP anggota kelompok Bunga Natal pendidikan SLTP, meminjam pada kelompok sebesar RP. 37.000.000,- pada tahun 2010 untuk usaha Rumpon Ikan yang dikelola oleh suaminya mengatakan bahwa:

“Pekerjaan suami saya adalah nelayan tradisional dengan penghasilan yang pas-pasan. Kami mau berusaha untuk meningkatkan pendapat keluarga melalui pekerjaan suami saya, setelah mengetahui ada program PNPM yang dapat memberikan bantuan modal, saya dan suami melakukan konsultasi dengan sekretaris UPK yang adalah juga penduduk desa ini. Ia menyarankan untuk kami bentuk kelompok tapi khusus perempuan dan kami beberapa ibu-ibu yang suaminya nelayan membentuk kelompok SPP

yaitu Bunga Natal. Setelah membuat Proposal dan memenuhi persyaratan program, kami ajukan permohonan dana pada PNPM. Pihak PNPM-MP dalam hal ini UPK mengabulkan permohonan kami dan meminjamkan kepada kami melalui kelompok Bunga Natal sebesar Rp. 37.000.000,- pada tahun 2010. Dana tersebut kami buat rumpon yang merupakan rumah ikan dan membeli alat tangkap ikan, dengan demikian hasil tangkapan meningkat” (ABP, Mei 2013).

Ibu AYR, Ketua Kelompok Bunga Natal mempunyai usaha yang dijalankan oleh suaminya, yaitu penangkapan ikan *giil net* meminjam pada tahun 2010 sebesar RP. 40.000.000,-, senada dengan ibu ABP mengatakan bahwa:

“Prosedur pinjam uang di PNPM tidak terlalu susah, kita bentuk kelompok, membuat proposal dan melengkapi persyaratan program lalu diajukan kepada UPK, selanjutnya tim verifikasi melakukan verifikasi kemudian UPK mencairkan dana sesuai dengan proposal permintaan dana yang diajukan. Saya waktu itu (tahun 2010) meminjam sebanyak RP. 40.000.000 yang digunakan oleh suami saya untuk membeli sarana penangkapan ikan yaitu perahu dan pukat (*giil net*). Suami saya itu nelayan yang sebelumnya menangkap ikan dengan alat tangkap yang sederhana yaitu mancing. Dengan bantuan modal dari PNPM ini pendapatan suami saya makin meningkat”(AYR, Mei 2013)

c. Analisis temuan lapangan

Terkait dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha dan sosial dasar para anggota SPP, dicermati bahwa pelaksanaan pendanaan dari tahap pencairan dana dan pengembalian dana, juga merupakan *strategy objective* dalam pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP.

Temuan lapangan tentang pelaksanaan pendanaan yaitu sebelum dana diterima oleh masing-masing anggota pada masing-masing kelompok SPP baik di desa Balukhering maupun di desa Sinar Hading pada alur kegiatan SPP terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi. Temuan proses verifikasi ini sangat menarik karena ada perbedaan pendapat yang dinyatakan oleh aparat desa Balukhering yaitu pada saat tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan kurang objektif, ada kelompok dadakan, dalam proposal menyatakan bahwa ada usaha

namun kenyataan di lapangan tidak dan ada anggota kelompok yang meminjam uang di PNPM untuk kebutuhan lain. Sedangkan menurut Fasilitator Kecamatan menyatakan bahwa sebelum dana dicairkan tim verifikasi telah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi maupun verifikasi lapangan. Sementara itu Ketua UPK mengakui bahwa ada kelemahan pada saat tim melakukan verifikasi bahwa tim tidak jeli melihat kelompok dan anggota kelompok pemanfaat program. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun pertama Program ini masuk di Kecamatan Lewolema, semua kegiatan mulai dari Sosialisasi pengenalan program sampai pada pendanaan dilakukan pada tahun yang sama.

Berdasarkan temuan tersebut penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pendanaan Kelompok SPP kurang mematuhi ketentuan program PNPM-MP yang termuat di dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP, karena baik pelaku di tingkat Kecamatan dan desa serta masyarakat penerima manfaat program belum dipersiapkan dengan baik. Persiapan yang baik tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan juga akan baik sesuai dengan ketentuan program.

Penjelasan alur kegiatan SPP yaitu pada proses verifikasi dapat dicermati bahwa dalam pelaksanaan verifikasi terdapat tahapan kunjungan lapangan atau pemeriksaan lapangan yang mengharuskan tim verifikasi untuk melakukan pengamatan langsung dengan masyarakat pengusul dan informan lainnya termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat di desa. Sebab akan diketahui kebenaran daftar calon penerima manfaat (termasuk nilai kebutuhan yang diajukan untuk kegiatan simpan pinjam) selain itu dalam proses ini, tim verifikasi juga perlu melibatkan kelompok penerima manfaat pada waktu penulisan usulan.

Tim Verifikasi juga harus melakukan verifikasi pemanfaat SPP dengan membandingkan daftar calon pemanfaat dengan data RTM.

Tahapan ini penting dilakukan oleh tim verifikasi untuk mengetahui apakah calon penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan kegiatan SPP yaitu diutamakan pada kelompok yang memiliki anggota kelompok rumah tangga miskin. Kunjungan lapangan yang dilakukan tim verifikasi ini juga agar dapat memberikan rekomendasi yang tepat sehingga dana bergulir yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan. Temuan lapangan menunjukan bahwa ada anggota kelompok yang bukan tergolong RTM dan juga ada anggota yang tergolong RTM. Hal ini menunjukan adanya ketimpangan ekonomi pada anggota kelompok, kondisi ini disebabkan karena tidak dijalankannya proses verifikasi yang maksimal oleh tim verifikasi. Dengan demikian maka sangat mempengaruhi proses pendanaan dalam kegiatan SPP dimana penentuan calon pemanfaat yang akan menerima dana bergulir merupakan suatu proses yang penting, krena pencapaian *goal* dari kegiatan SPP salah satunya dipengaruhi oleh *strategy objectives* yaitu pelaksanaan pendanaan. Pelaksanaan verifikasi oleh tim verifikasi sebagai salah satu pelaku dalam PNPM-MP, perlu diawasi oleh pelaku yang lain sehingga dana yang diberikan tepat sasaran dan usulan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa.

Merujuk pada gambaran program tentang mekanisme pencairan dana PNPM dari rekening UPK ke desa maka dapat dicermati bahwa proses penyerahan dana dari UPK ke desa/TPK tidak melalui proses yang panjang. Temuan lapangan yang terkait dengan hal ini yaitu persyaratan yang mudah untuk mendapatkan dana bergulir yang dirasakan anggota kelompok memperlancar

berlangsungnya proses pencairan. Hal ini sesuai dengan ketentuan program yang menunjukkan bahwa dokumen usulan kegiatan SPP hanya perlu dilengkapi dengan KTP dan perjanjian pinjaman. Sehingga terkait pencairan dana ini telah sesuai dengan ketentuan program.

Pada tahap pengelolaan dana, temuan lapangan menunjukkan bahwa dana yang diterima oleh anggota digunakan untuk berbagai kepentingan yaitu; digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya, ada juga anggota yang menggunakan untuk memulai usaha baru, ada juga anggota yang menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dasar rumah tangga lainnya.

Selanjutnya pada tahap pengembalian dana bergulir temuan lapangan menunjukkan bahwa di desa Balukhering ditemukan pengembalian pinjaman sebesar 78,6 % atau dengan kata lain terdapat kredit macet sebesar 21,4 %. Capaian ini tidak memenuhi standar kinerja nasional. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang akan di jelaskan pada sub bab berikut. Sedangkan dana bergulir pada desa Sinar Hading ditemukan pengembalian sebesar 95,2 % atau terjadi kredit macet sebesar 4,8 %. Capaian ini melebihi standar kinerja nasional yaitu sebesar 95 %.

Dari gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pendanaan kegiatan SPP pada desa Balukhering dan desa Sinar Hading berjalan dengan baik. Pada pelaksanaan usaha di desa Balukhering kurang berjalan dengan baik sehingga mempengaruhi pengembalian dana ke UPK. Sedangkan di desa Sinar Hading ditemukan pada pelaksanaan kegiatan usaha berjalan baik sehingga pengembalian pinjaman juga lancar, walaupun pada data awal sebelum pencairan yaitu pada tahap verifikasi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan

program. Ke depannya perlu ada pengawasan dari para pelaku lainnya yaitu pihak desa dan kecamatan terhadap pelaksanaan verifikasi oleh tim. Tim dipilih oleh masyarakat tentu saja mendukung pelaksanaan kegiatan SPP, tetapi dilain pihak hubungan kedekatan dan saling mengenal dapat membuat tim verifikasi tidak bekerja dengan optimal sesuai ketentuan program.

2. Memberikan Kesempatan Kaum Perempuan Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Pendanaan Modal Usaha

Pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan, peneliti juga mencermati pelaksanaan pendampingan / *Strategy objective* kegiatan SPP kepada para anggota kelompok yang mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah / *objective* kegiatan SPP. Terkait dengan pelaksanaan pendampingan yang dilaksanakan pada kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan di desa Balukhering dan desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema, ditemukan beberapa hal penting antara lain: informasi tentang adanya musyawarah-musyawarah pada awal pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, hanya diketahui beberapa orang saja.

1. Temuan Lapangan

Temuan lapangan di desa Balukhering terkait dengan informasi awal pelaksanaan kegiatan PNPM hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris desa Balukhering, VT yaitu:

“Informasi tentang program PNPM-MP pada awal program ini masuk di desa ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat di desa ini, karena yang hadir pada pertemuan tidak terlalu banyak orang, kebiasaan masyarakat di sini susah untuk mengikuti pertemua-pertemuan. Tapi pada tahun tahun selanjutnya banyak masyarakat yang sudah mengetahui itupun tidak secara mendalam”,(VT, Mei 2013).

Pernyataan VT di atas diperkuat dengan pernyataan salah satu anggota kelompok SPP Stelamaris, APK mengatakan bahwa :

“ Rapat pertama kali membicarakan tentang program PNPM saya tidak ikut, kemudian saya didatangi ketua kelompok dan ketua UPK yang juga adalah orang di sini mendaftarkan saya untuk bergabung dengan kelompok SPP Stelamaris, dan pada saat pencairan baru saya ikut rapat dan menerima dana tersebut”,(APK,Mei 2013)

Terkait dengan pendapat di atas ketua TPK desa Balukhering PS mengatakan dalam berbagai pertemuan yang dilaksanakan di desa maupun di dusun dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat termasuk kaum perempuan, ia mengatakan :

“Sebelum musyawarah perencanaan didahului dengan penggalan gagasan di lingkungan maupun di dusun, dalam penggalan gagasan itu, TPK bersama dengan KPMD/K melaksanakan musyawarah di dusun untuk mencari usulan apa di dusun untuk mencari usulan apa dari dusun untuk dibawa pada musyawarah perencanaan di desa sekaligus kami mengundang perwakilan masyarakat di dusun untuk berpartisipasi dalam perencanaan di desa, jika dalam usulan tersebut terdapat kegiatan SPP maka usulan tersebut akan dibahas dalam forum MAD Khusus Perempuan”, (PS,Mei 2013).



Gambar: 4.12. MAD Khusus Perempuan di Desa Balukhering (Juni,2009)

Pelaksanaan pendampingan ditemukan bahwa jika terdapat kesulitan yang ditemui dalam hal ini misalnya kesalahan administrasi dan pembukuan maka pengurus kelompok langsung melakukan konsultasi langsung kepada ketua UPK tanpa melaksanakan kordinasi lebih dahulu dengan pendamping lokal atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (KPMD/K). Hal ini disampaikan oleh ketua Kelompok PMRK ibu ABP mengatakan :

“Saya selalu melakukan konsultasi dengan Ketua UPK karena kebetulan dia orang dari desa ini juga apalagi rumah kami berdekatan, karena dia pernah bilang, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam pengelolaan kelompok SPP nanti konsultasi di saya saja. Ketika ada musyawarah di desa rata-rata ibu-ibu yang hadir tidak omong tapi ya-ya saja, tapi setelah selesai pertemuan baru omong banyak ” (ABP, Mei 2013).

Pernyataan ibu ABP di atas didukung dengan pernyataan Ketua UPK yaitu AB, yang menggambarkan bahwa proses pendampingan awal yaitu administrasi untuk pencairan dana seharusnya dilakukan oleh KPMD/K tetapi dalam pelaksanaannya kelompok lebih banyak menghubungi dirinya, lebih lanjut ia mengatakan :

“Di desa sudah ada KPMD/K, sudah ada format-format yang sudah disiapkan dari program, kita juga sudah mensosialisasikan tentang pengisian format-format itu kepada KPMD/K, merekalah yang merupakan perpanjangan tangan dari Fasilitator dan UPK, jadi kelompok yang berminat atau kaum perempuan di desa yang berminat berurusan dengan mereka. KPMD/K yang mendaftarkan nama-nama perempuan yang berminat dan sebagainya selanjutnya membuat proposal, jadi dengan formulir-formulir itu mereka mengisi masing-masing arang dan kelompok termasuk kebutuhan dan usahanya daqan diketahui oleh pemerintah setempat. Tapi kebetulan saya orang sini, mereka selalu omong dengan saya atau berurusan dengan saya, seharusnya melalui KPMD/K dulu”,(AB, Juni 2013).



Gambar: 4.13. Wawancara dengan Ketua UPK Lewolema (Mei 2013)

Temuan lapangan di desa Sinar Hading terkait dengan informasi awal tentang program PNPM Mandiri Perdesaan menurut kepala desa Sinar Hading mengatakan bahwa :

“Tahun 2009 Program PNPM Mandiri Perdesaan masuk di Kecamatan Lewolema dan desa Sinar Hading merupakan ibu kota kecamatan, sehingga informasi tentang program PNPM Mandiri Perdesaan masyarakat disini tau duluan daripada masyarakat di desa lain, apalagi pelaku PNPM tingkat kecamatan berada di sini. Ketika informasi itu menyebar di masyarakat, masyarakat sangat antusias dan menanyakan kapan program itu dilaksanakan.

Menurut AGT ketua kelompok Ibu Kota mengatakan bahwa :

“Setelah saya dengar bahwa ada program PNPM-MP yang salah satu kegiatannya adalah memberi bantuan pinjaman kepada kelompok kaum perempuan, saya memanggil anggota kelompok yang waktu itu beranggotakan 5 orang menyepakati untuk pinjam uang di PNPM. Tapi ketika saya tanya pihak UPK, mereka jawab nanti mungkin bulan sepuluh baru bisa realisasi. Kami pinjam untuk mengembangkan usaha kami di bidang tenun ikat. Karena ada peluang bahwa tiap tahun para turis kunjung kami punya desa dan mereka membeli hasil tenun di desa ini. Dengan usaha ini kami bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga, apalagi biaya sekolah sekarang mahal, harap dari mente (mete) saja tidak bisa, kita ibu-ibu harus cari tambahan luar”.(AGT,Mei 2013)

Selanjutnya evaluasi terhadap Memberikan Kesempatan Kaum Perempuan Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Pendanaan Modal Usaha pada SPP untuk kelompok perempuan desa Balukhering dan desa Sinar Hading dapat dilihat pada tabel 4.6. dan 4.7 tentang perkembangan usaha dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar anggota kelompok dengan membandingkan usaha dan kondisi awal sebelum menerima dana bergulir dan setelah menerima dana.

UNIVERSITAS TERBUKA

Tabel 4.6. Perkembangan Usaha dan Kondisi Sosial Dasar Anggota Kelompok SPP Desa Balukhering

No	Kelompok	Informan	Keadaan sebelum menerima dana bergulir	Keadaan setelah menerima dana bergulir
1	Remaja Putra	KSR	Memiliki kios, menjual barang kebutuhan dalam jumlah dan jenis yang sedikit	Menjual sembilan bahan kebutuhan masyarakat, pulsa, memiliki kendaraan <i>pick up</i> membeli dan menjual hasil komoditi masyarakat serta menjadi pengecer pangkalan minyak tanah.
2	Stelamaris	APK	Tidak memiliki sepeda motor untuk ojek yang dijalankan oleh suaminya	Pernah memiliki sepeda motor, sudah ditarik oleh pihak dailer karena tidak melunasi cicilan kredit motor
3	Anggrek	AWK	Belum memiliki listrik PLN	Sudah memiliki listrik PLN
4	Anggrek	SNW	Memiliki kios dengan menjual barang dalam jenis dan jumlah yang sedikit.	Menjual sembilan bahan kebutuhan pokok masyarakat, membuka jasa menjahit
5	Melati	MLM	Belum memiliki listrik PLN	Sudah memiliki listrik PLN
6	Kenari	YD	Tidak mempunyai usaha	Pernah memiliki usaha ternak ayam pedaging, sekarang tidak memiliki usaha lagi
7	Kamboja	LK	Tidak mempunyai usaha	Pernah mempunyai usaha ternak babi 3 ekor, tapi sudah dikonsumsi pada saat anak Sambut Baru.
8	Pelangi	YR	Tidak memiliki usaha	Pernah mempunyai usaha membuat minyak kelapa untuk dijual, namun sekarang tidak memiliki usaha lagi
9	PMRK	ABB	Memiliki usaha membuat kasur	Tetap memiliki usaha membuat kasur dengan volume tergantung pesanan.
10	Krisno Sonata	AYP	Memiliki Usaha Penangkaran bibit yang dikelola oleh suaminya	Tetap memiliki usaha penangkaran bibit yang dikelola oleh suaminya

Sumber: Olahan penulis

Tabel 4.7. Perkembangan Usaha dan Kondisi Sosial Dasar Anggota Kelompok SPP Desa Sinar Hading

No	Kelompok	Informan	Keadaan sebelum menerima dana bergulir	Keadaan setelah menerima dana bergulir
1	Ibu Kota	AGT	Kelompok tenun ikat dengan omset yang masih sedikit	Menghasilkan tenun ikat dengan omset makin meningkat.
2	Flamboyan	APT	Tidak memiliki usaha	Menjadi pedagang ikan
3	Avila Jaya	YK	Menjual Rokok dan kebutuhan rumah tangga dalam jumlah terbatas	Memiliki kios yang menjual sembilan bahan pokok dengan jumlah dan jenis yang cukup banyak
4	Permata	SNW	Menjual kebutuhan rumah tangga dalam jumlah terbatas	Memiliki kios yang menjual sembilan bahan pokok dengan jumlah dan jenis yang cukup banyak serta membeli dan menjual komoditi masyarakat
5	Anggrek	IWR	Tidak memiliki usaha	Memiliki mesin parut kelapa
6	Kenari	ALR	Tidak mempunyai usaha	Menjual pulsa
7	Pelangi	AR	Tidak mempunyai usaha	Pernah mempunyai usaha ternak babi 3 ekor, tapi sudah dikonsumsi pada saat anak Sambut Baru.
8	Kasih	YR	Tidak memiliki usaha	Menjual minyak kelapa
9	Bunga Natal	ABP	Memiliki sarana tangkap ikan tradisional	Memiliki Rumpon, dan sarana tangkap ikan yang lebih baik
10	Bunga Natal	AYR	Memiliki sarana tangkap ikan tradisional	Memiliki sarana alat tangkap yang modern

Sumber: Olahan penulis

Berdasarkan tabel 4.6 dan 4.7 di atas dapat diketahui bahwa secara umum anggota kelompok SPP dari desa Balukhering dan desa Sinar Hading mengalami perkembangan yang positif dalam pengelolaan usaha dan pemenuhan kebutuhan sosial dasarnya. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan pengembangan usaha dan penambahan usaha baru.

2. Analisis terhadap temuan lapangan

Kegiatan SPP memiliki alur kegiatan yang dimulai MAD Sosialisasi sampai pada pengembalian SPP dan di dalam alur tersebut dijelaskan juga kriteria peserta yang diharapkan dapat mengikuti musyawarah-musyawarah tersebut. Alur tersebut menunjukkan bahwa pada musyawarah hanya melibatkan wakil perempuan /wakil dari kelompok perempuan. Tugas dan tanggung jawab fasilitator kecamatan pada awal pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan salah satunya yaitu menginformasikan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan pada masyarakat dan aparat desa. Dicermati juga dalam ketentuan program bahwa PL dan KPMD/K pada tahap kegiatan SPP harus terpilih pada Mudes Sosialisasi dan kemudian menjalankan tugasnya pada musyawarah penggalan gagasan di dusun sehingga pada pertemuan pertemuan awan dalam kegiatan SPP ini pemneritahuan informasi masih dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan.

Selanjutnya tugas pendamping adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat merupakan tugas awal yang penting dalam sebuah kegiatan pemberdayaan. Dimana masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dalam sebuah program. Menurut If, tugas untuk memberikan informasi merupakan bagian dari salah satu peranan fasilitatif yaitu peranan animasi sosial. Dimana pendamping mampu memampukan masyarakat untuk bersedia terlibat aktif dalam proses perubahan komunitasnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Fasilitator Kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dimana ia selalu memberi informasi kepada pengurus mengenai pertemuan-pertemuan yang diadakan.

3. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh Kaum Perempuan

Pada tujuan jangka menengah ketiga ini selain memenuhi dua tujuan diatas tujuan lain yang harus dicapai yaitu melalui kegiatan SPP ini diharapkan terjadi penguatan lembaga simpan pinjam oleh kaum perempuan. Dalam pencapaian tujuan ketiga ini yaitu *strategy objective* yang mempengaruhi pencapaiannya yaitu pelaksanaan kegiatan SPP ini diharapkan agar kelompok simpan pinjam untuk kaum perempuan semakin kuat.

a. Temuan Lapangan

Berkaitan dengan ini di lapangan ditemui hal menarik untuk dicermati yaitu bahwa dari semua kelompok SPP untuk perempuan baik di desa Balukhering maupun desa Sinar Hading kelompok hanyalah merupakan formalitas untuk mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Terdapat hanya satu kelompok SPP dari kedua desa tersebut yaitu Kelompok Ibu Kota di desa Sinar Hading dimana usaha dilakukan secara bersama-sama dan kegiatan simpan pinjam berjalan dengan baik. Hal tersebut merupakan kesimpulan pelaku program PNPM-MP di tingkat kecamatan dalam suatu diskusi tentang penanganan kredit macet di Kecamatan Lewolema. Pelaku program di tingkat kecamatan terdiri dari: Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan (FK), Fasilitator Teknik (FT), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi dan Tim Penanganan Kredit Macet.



Gambar : 4.14. Diskusi Pelaku PNPM-MP Kecamatan Lewolema (Juni 2013)

Kesimpulan dari hasil diskusi di atas berdasarkan masukan dari pelaku PNPM-MP tingkat Kecamatan Lewolema yang didasari oleh monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok SPP di kecamatan Lewolema. Fasilitator Kecamatan, SLT mengatakan bahwa :

“Ketika kami melakukan monev ditemukan bahwa hampir semua kelompok SPP di Kecamatan Lewolema ada karena hanya mau ingin dapat pinjam uang di PNPM saja, boleh dibilang kelompok papan nama, kenyataan tidak ada kegiatan di kelompok baik kegiatan organisasinya maupun usahanya. Memang ada struktur kelompok SPP yaitu Ketua sekretaris, bendahara dan anggota, tapi tidak ada pembukuan kelompok misalnya buku agenda, buku kas, buku simpanan dan pinjaman anggota, buku cicilan kredit dan sebagainya. Selain itu mereka tidak pernah mengadakan pertemuan kelompok. Ke depannya kita harus memikirkan bagaimana kita melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok baik dari segi organisasinya maupun dari segi usahanya”.(SLT, diskusi Juni 2013).

Menurut ketua tim Verifikasi PS mengatakan bahwa :

“Ketika kami melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi terhadap proposal usulan pendanaan kelompok SPP maupun verifikasi lapangan kami temukan memang ada kelompok Perempuan, apakah itu hanya sekedar mendapatkan dana mumpung ada program ini mereka bentuk

kelompok lalu uang itu anggota kelolah sendiri, kelompok hanya formalitas saja” (PS, diskusi Juni 2013)

Ketua UPK, AB dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa:

“Kami mengelolah dana SPP dan Non SPP, untuk yang SPP orientasi kami yang terpenting adalah dana itu cair kepada pemanfaat yaitu kaum perempuan melalui kelompok dan cicilan yang masuk ke UPK, sehingga ketika sudah ada yang macet kami langsung turun tagi pada pemanfaat program, tetang penguatan kelembagaan kelompok SPP kita pikirkan bersama apakah lewat pendampingan/pembinaan atau kita mengadakan pelatihan penguatan kapasitas kelompok SPP”,(AB, diskusi Juni 2013).

Sementara itu menurut PJOK, PK mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap sebuah organisasi adalah lemahnya SDM kelompok SPP itu sendiri, rata-rata pengurus dan anggota kelompok SPP itu tingkat pendidikannya tidak tamat SD dan tamat SD ada juga yang SLTP dan SLTA tapi itu bisa dihitung dengan jari dan juga kurang berpengalaman dalam berorganisasi, kedepan kita harus buat pelatihan untuk penguatan kelembagaan Kelompok SPP selain itu, tugas untuk melakukan pendampingan berdasarkan PTO PNPM-MP adalah tugas KPMD/K dan Pendamping Lokal, mereka adalah fasilitator dan kader pemberdayaan di desa apalagi mereka sudah mengikuti pelatihan”, (PK,diskusi Juni 2013)

Ketua Tim penanganan kredit macet, AT menyampaikan pengalamannya ketika menagani kredit macet di desa Balukhering mengatakan bahwa :

“Ketika kita melakukan penanganan kredit macet di desa Balukhering kita sangat kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat di kelompok baik keanggotaan maupun bukti-bukti keuangan. Administrasi di kelompok juga tidak ada, ini kelemahan, kedepannya kita sama-sama memikirkan untuk perbaikan tentang kelembagaan kelompok-kelompok SPP di Kecamatan Lewolema pada umumnya”,(AT,diskusi Juni 2013).

b. Analisis Temuan Lapangan

Salah satu tujuannya menengah pelaksanaan program PNPM-MP pada kegiatan SPP adalah mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Temuan lapangan dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh pelaku program PNPM-MP tingkat kecamatan Lewolema menyimpulkan

bahawa terhadap tujuan tersebut belum dapat dicapai, karena pemanfaat program khususnya kaum perempuan hanya menggunakan kelompok sebagai sarana untuk mendapatkan modal usaha. Disamping itu tugas pendampingan baik pada pelaku tingkat kecamatan maupun di desa tidak berjalan sebagaimana di amanatkan dalam PTO. Tugas yang paling utama dalam melakukan pendampingan penguatan kelembagaan SPP berdasarkan PTO PNPM-MP adalah KPMD/K dan Pendamping lokal, namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPMD/K dan PL inilah yang merupakan agen penting bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dimana setelah berakhirnya periode kegiatan pemberdayaan diharapkan mereka dapat terus mendukung proses pemberdayaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumodiningrat bahwa akses langsung terhadap sumber daya kapital / penyediaan modal ekonomi penting dilengkapi dengan pendampingan oleh tokoh/penggerak di kalangan masyarakat yang dapat mengembangkan prakarsa untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian.

Berdasarkan penjelasan dalam PTO program dan konsep tentang pendampingan dari Ite maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan program dan kenyataan di lapangan, dimana baik pelaku di tingkat kecamatan maupun di desa khususnya KPMD/K dan PL tidak optimal dalam melaksanakan pendampingan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hubies dalam pengembangan ekonomi kerakyatan khusus wanita bahwa tidak cukup diiming-iming dengan bantuan modal, tetapi perlu diimbangi dengan pembekalan sains dan teknologi yang mampu memberdayakan wanita untuk mengubah nasibnya sendiri.

Temuan lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan dalam kegiatan SPP pada kelompok SPP di Kecamatan Lewolema pada umumnya dan di desa Balukhering dan desa Sinar Hading pada khususnya secara umum dapat disimpulkan bahwa selama periode kegiatan SPP sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, pendampingan dilakukan oleh Pelaku program tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pendampingan yang tidak maksimal tentu saja mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan SPP, karena jika mencermati model perencanaan kegiatan SPP ini maka terlihat bahwa proses pendampingan merupakan salah satu *strategy objective* untuk mencapai *goal* tidak tercapai.

F. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan SPP

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan dalam tesis ini merupakan temuan lapangan ketika peneliti melakukan penelitian (*grounded*). Pelaksanaan program PNPM-MP pada kegiatan SPP untuk kelompok perempuan di desa Balukhering dan desa Sinar Hading dicermati beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi kegiatan SPP tersebut yaitu :

1. Faktor Pendukung Kegiatan SPP

Beberapa faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP di desa Balukhering yaitu pada umumnya semua anggota SPP terdapat adanya semangat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan usaha dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya dari program PNPM-MP khususnya pada SPP. Kepala Desa Balukhering mengatakan bahwa :

“Masyarakat di desa ini mengetahui tentang program PNPM-MP yang di dalamnya ada SPP lewat Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan Fasilitator Kecamatan (FK) dalam forum MAD Sos. Setelah Mengerti tentang program tersebut, Masyarakat antusias khususnya kaum perempuan untuk membentuk Kelompok SPP. Jadi rata-rata kelompok SPP di desa ini dibentuk karena ada Program PNPM ini” (AKK, Mei 2013)

Senada dengan Kepala desa Balukhering ibu YD anggota Kelompok

Kenari mengatakan bahwa :

“Program PNPM ini baik karena dapat membantu masyarakat khususnya kaum perempuan untuk usaha ekonomi sehingga dapat menambah pendapatan keluarga”.(YD Mei 2013).

Ibu AWK anggota kelompok anggrek mengatakan bahwa :

“Prgram PNPM ini baik karena dapat membantu kami yang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar kami, Pada tahun 2009 ada jaringan listrik PLN masuk di desa ini, pada saat itu kami tidak punya uang, saya bergabung di kelompok Anggrek agar saya juga dapat meminjam uang di PNPM, dimana biaya pemasangan listrik pada saat itu” (AWK, Mei 2013)

Selain faktor di atas, persyaratan untuk mendapatkan dana yang dirasakan oleh ibu-ibu kelompok SPP di Desa Balukhering juga sangat mudah yaitu hanya menggunakan Foto copy KTP, ibu YR anggota kelompok Pelangi mengatakan bahwa :

“Program PNPM ini cukup membantu modal kami untuk mengembangkan usaha dan prosedurnya tidak berbelit-belit seperti di bank, di PNPM kami hanya melengkapi foto copy KTP dan mengisi formulir saja untuk dilengkapi dalam proposal usulan”. (YR, Mei 2013).

Pernyataan ibu YR di atas didukung dengan pernyataan PJOK

Kecamatan, PK mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan SPP untuk kelompok perempuan di Kecamatan Lewolema ini saya nilai cukup baik, melihat kondisi ekonomi masyarakat Lewolema dimana dari total dana dalam tahun berjalan 25 % digunakan untuk SPP ini sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat untuk mengelola danan itu dengan baik sehingga dapat mengembalikan cicilan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh kelompok lain di wilayah ini. Kegiatan ini dapat membantu masyarakat karena proses pencairan dan peryaratan yang dipenuhi sangat mudah hanya dibutuhkan proposal kelompok dan foto copy KTP anggota”(PK, Mei 2013)

Faktor lain yang juga turut membantu pelaksanaan kelompok SPP di desa Balukhering yaitu Ketua UPK merupakan penduduk desa Balukhering, sehingga pendampingan, pembinaan dan konsultasi oleh anggota kelompok dapat berjalan dengan baik. Ketua kelompok PMPK ibu ABP mengatakan :

“Saya selalu melakukan konsultasi dengan Ketua UPK karena kebetulan dia orang dari desa ini juga apalagi rumah kami berdekatan, karena dia pernah bilang, jika ada hal-hal yang kurang dimengerti dalam pengelolaan kelompok SPP nanti konsultasi di saya saja. Ketika ada musyawarah di desa rata-rata ibu-ibu yang hadir tidak omong tapi ya-ya saja, tapi setelah selesai pertemuan baru omong banyak ” (ABP, Mei 2013)

Ketua UPK Kecamatan Lewolema, AB mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan SPP untuk kelompok perempuan di desa Balukhering ini saya selalu didatangi oleh ibu-ibu anggota kelompok untuk melakukan konsultasi tentang usaha dan pengembalian pinjaman, kami di UPK Kecamatan sudah membagi wilayah dampingan dan menagih cicilan, sayalah yang bertugas di sini, kebetulan saya orang sini”,(AB Mei 2013)

Temuan lapangan di desa Sinar Hading terkait dengan faktor pendukung pelaksanaan SPP ditemukan bahwa pada awal program ini dilaksanakan di desa Sinar Hading masyarakat sangat antusias khususnya kaum perempuan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sinar Hading, NSL mengatakan bahwa :

“Setelah masyarakat di desa Sinar Hading memahami tentang program PNPM melali MAD Sos, masyarakat senang dan antusias untuk membentuk kelompok SPP” (NSL, Mei 2013)

Ibu AGT, Ketua kelompok Ibu Kota senada dengan pernyataan kepala desa mengatakan bahwa :

“Kelompok tenun ikat Ibu Kota sudah ada sebelum program ini hadir di kecamatan Lewolema, setelah mendengar informasi tentang PNPM yang di dalamnya ada bantuan modal usaha untuk kaum perempuan kami sangat senang dan makin semangat untuk mengembangkan usaha tenun ikat karena mendapat tambahan modal usaha dari SPP tersebut sehingga usaha kami sekarang sudah berjalan cukup maju”, (AGT, Mei 2013).

Ibu APT, anggota kelompok Flamboyan mendukung pernyataan ibu AGT mengatakan bahwa :

“Pada tahun 2009 program PNPM masuk di desa memberikan kemudahan kepada kaum ibu-ibu mendapatkan modal usaha dengan mudah karena persyaratannya tidak sulit dan kami sangat senang dengan program ini”. (APT, Mei 2013).

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi pelaksanaan SPP untuk kelompok perempuan adalah adanya kemudahan untuk mendapatkan dana dari PNPM-MP. Masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Ibu SNW, anggota kelompok permata mengatakan bahwa:

“Proses pinjam uang di PNPM mudah yaitu kami beberapa ibu-ibu di RT ini membentuk kelompok SPP, kami buat proposal dan memenuhi persyaratan program, Fasilitator Kecamatan dan UPK datang menyerahkan uang kepada kami melalui kelompok yang disaksikan oleh TPK dan pemerintah desa dengan bunga yang disepakati dalam forum MAD Kusus Perempuan menyepakati sebesar 1,1%. Persyaratan yang dibutuhkan untuk kelengkapan proposal hanya foto copy KTP”, (SNW, Mei 2013).

Ibu YK, anggota kelompok SPP Avila jaya merasa bahwa ada kemudahan untuk mendapatkan dana dalam rangka mengembangkan usaha perkiosannya.

Senada dengan ibu SNW mengatakan bahwa :

“Sebelum Program PNPM ini ada, saya hanya menjual rokok saja, saya berniat untuk mengembangkan usaha saya yaitu kios, tapi modal saya terbatas, untuk mendapatkan dana dari PNPM harus melalui kelompok, karena ketentuan program begitu, lalu kami beberapa ibu-ibu membentuk kelompok SPP dan mendapatkan bantuan modal usaha dari PNPM”.(YK,Mei 2013).

Selain persyaratan yang mudah, faktor lain yang turut mempengaruhi berkembangnya kegiatan SPP di desa Sinar Hading adalah faktor letak geografis, dimana desa Sinar Hading merupakan ibu kota Kecamatan Lewolema, sehingga Kelompok dan anggota SPP yang ada di desa Sinar Hading untuk melakukan konsultasi dan sebagainya dalam rangka pelaksanaan SPP di desa. Selain itu rata-rata pelaku program tingkat kecamatan berdominsili di desa Sinar Hading sehingga memudahkan pengawasan dan koordinasi dengan pelaku di tingkat desa dan kelompok SPP. Temuan lapangan di Desa Sinar Hading disampaikan oleh Kepala Desa Sinar Hading, NSL mengatakan bahwa:

“Kelompok SPP di desa ini berjalan baik dan ada peningkatan dari tahun-ke tahun baik usaha maupun jumlah kelompok yang bertambah, ini karena desa Sinar Hading merupakan Ibu Kota Kecamatan Lewolema, pelaku dan fasilitas program di tingkat kecamatan ada di sini sehingga kelompok SPP dapat memanfaatkannya untuk pengembangan usaha kelompok, ada kemudahan-kemudahan yang dapat diperoleh karena kita sebagai ibu kota kecamatan” ,(NSL,Mei 2013).

Terkait dengan pendanaan dan pengembalian dana bergulir di desa Sinar Hading Ketua UPK Kecamatan Lewolema, AB mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan SPP untuk desa Sinar Hading dapat saya jelaskan bahwa sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah kelompok SPP mencapai 29 kelompok dengan jumlah anggota 373 orang. Kegiatan SPP di desa Sinar Hading pada umumnya berjalan dengan baik dan menjadi salah satu desa contoh untuk kecamatan Lewolema. Alokasi dana SPP untuk desa Sinar Hading sebesar RP. 926.625.000,- dengan tingkat pengembalian sebesar 95,2 % dan mencapai Standar Kinerja Nasional (SKN), hal ini terjadi karena desa Sinar Hading merupakan ibu kota kecamatan yang memudahkan pelaku di tingkat kecamatan untuk melakukan pengawasan dan money”, (AB, Juni 2013).

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan untuk memudahkan pelaksanaan analisis maka peneliti mencermati faktor pendukung pelaksanaan kegiatan SPP dalam 2 bagian yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok atau faktor internal dan faktor yang berasal dari luar kelompok atau faktor eksternal.

a. Faktor internal

Temuan lapangan terkait dengan faktor internal dalam pelaksanaan program SPP untuk kaum perempuan baik di desa Balukhering maupun di desa Sinar Hading terdapat hanya satu faktor internal yang dimiliki oleh kaum perempuan yaitu motivasi dan semangat kaum perempuan untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Menurut Hubeis keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran wanita akan bergantung pada tiga unsur yaitu motivasi wanita untuk memberdayakan diri, program-program tepat guna dan pemberdayaan yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan wanita dan peran aktif masyarakat.

Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/skill (psikomotorik) dan mental yang berkaitan dengan semangat dan motivasi untuk merubah diri dan keluarga.

b. Faktor eksternal

Selain faktor internal yang mendukung pelaksanaan kegiatan SPP untuk kelompok perempuan pada desa Balukhering dan desa Sinar Hading, ada juga beberapa faktor eksternal yang berasal dari luar kelompok yang mendukung pelaksanaan SPP, yaitu persyaratan untuk mendapatkan dana dari kegiatan SPP yang dirasakan Kelompok dan anggota sangat mudah, yaitu hanya dengan proposal dan foto copy KTP. Kemudahan persyaratan ini sesuai dengan ketentuan dasar dalam pendanaan BLM dimana dengan kemudahan ini masyarakat miskin mudah dan cepat mendapat pelayanan pendanaan untuk memenuhi kebutuhannya tanpa syarat agunan.

Di samping persyaratan yang mudah, eksternal faktor lain yang turut mempengaruhi pelaksanaan SPP, faktor geografis juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPP. Kelompok SPP yang ada di desa Sinar Hading yang merupakan ibu kota kecamatan dimana terdapat kantor UPK dan pelaku Program tingkat kecamatan berada di desa tersebut, memudahkan kelompok dan anggota melakukan konsultasi dan mengakses hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan SPP. Begitu pula sebaliknya dengan jarak yang dekat pelaku program tingkat kecamatan dengan mudah melakukan pendampingan dan monev terhadap kelompok SPP di desa Sinar Hading.

Berdasarkan gambaran faktor pendukung internal dan eksternal diatas maka dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung tersebut telah mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan pendanaan khususnya pengembalian dana bergulir anggota kelompok kepada UPK. Faktor pendukung diatas juga secara langsung mempengaruhi pencapaian tujuan

jangka menengah pertama yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar lainnya, dan mendukung tercapainya tujuan khusus yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.

2. Faktor Penghambat Kegiatan SPP

Selain faktor pendukung seperti penulis paparkan di atas, dalam pelaksanaan kegiatan SPP di desa Balukhering dan desa Sinar Hading terdapat pula faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Faktor faktor tersebut antara lain tingkat pendidikan dan pemahaman anggota tentang SPP sangat rendah serta kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh Pelaku program baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

Berdasarkan identifikasi kelompok dan anggota kelompok baik di desa Balukhering maupun di desa Sinar Hading seperti penulis paparkan di atas ditemukan bahwa rata-rata tingkat pendidikan pengurus dan anggota kelompok SPP pada dua desa tersebut hanya berpendidikan dasar (SD dan SLTP). Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang program SPP tersebut. Fasilitator Kecamatan SLT mengatakan bahwa :

“Tingkat pendidikan pemanfaat dana SPP khususnya kaum perempuan di Kecamatan Lewolema rendah karena rata-rata pemanfaat program SPP hanya berpendidikan dasar (SD dan SLTP), hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman program juga rendah. Kami sedang memikirkan untuk melakukan pelatihan baik tentang organisasi (kelembagaan dan pengelolaan administrasi kelompok) dan pelatihan tentang keterampilan untuk pengembangan usaha ekonomi”, (SLT, Juni 2013).

Menurut Seretaris Desa Balukhering terkait dengan tingkat pendidikan pengurus dan anggota kelompok SPP di desa Balukhering, VT mengatakan bahwa :

“Rata-rata tingkat pendidikan ibu-ibu di kampung ini hanya berpendidikan dasar sehingga pemahaman tentang program juga rendah. Kenyataan demikian ditambah lagi dengan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pelaku program baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan kepada kelompok, selain itu sejak bergulirnya Program PNPM MP ini di desa, belum pernah ada pelatihan untuk anggota kelompok, pelatihan tentang administrasi dan pembukuan kelompok dan pelatihan keterampilan usaha ekonomi”,(VT, Juni 2013).

Ibu UK anggota kelompok Kamboja berpendidikan SD meminjam uang di PNPM untuk usaha beternak babi mengatakan bahwa :

“Ketrampilan yang saya miliki terbatas, jadi waktu saya pinjam uang di PNPM itu saya gunakan untuk beternak babi secara kebiasaan yang sudah turun temurun, pendidikan saya juga terbatas, yang bisa saya lakukan adalah piara babi karena itu merupakan pekerjaan yang gampang dilakukan oleh saya”,(UK, Mei 2013)

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya pertemuan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota, Ketua UPK AB mengakui hal tersebut ia mengatakan :

“Pertemuan di kelompok boleh dikatakan hampir tidak pernah ada karena anggota bergabung dalam kelompok hanya sekedar mendapatkan dana, dan ada kelompok SPP yang hanya formalitas, dan ketika mendapatkan dana, dana tersebut dikelola sendiri oleh ketua kelompok, bagaimanapun mungkin ada pertemuan di kelompok” (AB, Juni 2013).

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program SPP juga disebabkan karena verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi kurang maksimal sesuai dengan ketentuan program. Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Desa Baluk Hering bahwa :

“Ada kelompok SPP di desa ini yang hanya secara formalitas dibentuk kelompok, namun dananya digunakan sendiri untuk usaha perkiosan dan

membeli hasil komoditi masyarakat seperti kopra dan mete. Usahanya berkembang pesat sehingga dapat membeli dua *puck up*. Saya heran apakah tim verifikasi tidak melakukan verifikasi lapangan dan ketika pengajuan proposal ke UPK Kecamatan apakah hanya melakukan verifikasi administrasi saja? Kelemahan lain adalah pada saat tim verifikasi lapangan kita pemerintah desa tidak dilibatkan karena kami tau kelompok mana kelompok yang mempunyai usaha dan mana yang merupakan kelompok dadakan, demikian juga dengan anggota kelompok. Kami tau masyarakat kami mana yang betul-betul punya usaha dan mana yang tidak, ada juga yang pinjam uang untuk buat persta anak sambut baru, saat pengembalian baru cari uang dari sumber lain untuk mencicil, sehingga di desa ini banyak sekali terjadi kredit macet” (VT, Mei 20013).

Temuan lapangan di desa Sinar Hading terdapat dua orang ibu yang tergabung dalam Kelompok SPP Bunga Natal meminjam uang di PNPM-MP mengembangkan usaha perikanan yang dikelola oleh suami mereka. Ibu ABP anggota kelompok Bunga Natal, meminjam untuk usaha Rumpon Ikan yang dikelola oleh suaminya mengatakan bahwa:

“Pekerjaan suami saya adalah nelayan tradisional dengan penghasilan yang pas-pasan. Kami mau berusaha untuk meningkatkan pendapat keluarga melalui pekerjaan suami saya, setelah mengetahui ada program PNPM yang dapat memberikan bantuan modal, saya dan suami melakukan konsultasi dengan sekretaris UPK yang adalah juga penduduk desa ini. Ia menyarankan untuk kami bentuk kelompok tapi khusus perempuan dan kami beberapa ibu-ibu yang suaminya nelayan membentuk kelompok SPP yaitu Bunga Natal. Setelah membuat Proposal dan memenuhi persyaratan program, kami ajukan permohonan dana pada PNPM. Pihak PNPM-MP dalam hal ini UPK mengabulkan permohonan kami dan meminjamkan kepada kami melalui kelompok Bunga Natal sebesar Rp. 37.000.000,- pada tahun 2010. Dana tersebut kami buat rumpon yang merupakan rumah ikan dan membeli alat tangkap ikan, dengan demikian hasil tangkapan meningkat” (ABP, Mei 2013).

Ibu AYR, Ketua Kelompok Bunga Natal Ia mempunyai usaha yang dijalankan oleh suaminya, yaitu penangkapan ikan *gill net*, senada dengan ibu ABP mengatakan bahwa:

“Prosedur pinjam uang di PNPM tidak terlalu susah, kita bentuk kelompok, membuat proposal dan melengkapi persyaratan program lalu diajukan kepada UPK, selanjutnya tim verifikasi melakukan verifikasi kemudian UPK mencairkan dana sesuai dengan proposal permintaan dana

yang diajukan. Saya waktu itu (tahun 2010) meminjam sebanyak RP. 40.000.000 yang digunakan oleh suami saya untuk membeli sarana penangkapan ikan yaitu perahu dan pukat (*giil net*). Suami saya itu nelayan yang sebelumnya menangkap ikan dengan alat tangkap yang sederhana yaitu mancing. Dengan bantuan modal dari PNPM ini pendapatan suami saya makin meningkat”(AYR, Mei 2013)

Untuk menganalisis faktor penghambat terhadap temuan lapangan seperti digambarkan di atas, penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

a. Faktor internal

Faktor penghambat pelaksanaan SPP yang berasal dari dalam kelompok antara lain tingkat pendidikan pengurus dan anggota kelompok SPP rata-rata hanya sebatas pendidikan dasar (SD dan SLTP), ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pemahaman pengurus dan anggota terhadap program SPP juga rendah. Hal ini juga dipengaruhi faktor lain yaitu tidak adanya peningkatan SDM yang dilakukan oleh Pelaku program melalui pelatihan di bidang kelembagaan atau organisasi dan pelatihan pengembangan usaha ekonomi rumah tangga. Selain itu pertemuan antara anggota kelompok juga tidak pernah dilaksanakan.

Analisis ini sejalan dengan konsep Hubeis tentang keberhasilan pemberdayaan sumber daya wanita yakni faktor intern meliputi aspek Pengetahuan (Kognitif), Ketrampilan/*skill* (psikomotorik) dan mental (afektif) yang berkaitan dengan semangat dan motivasi untuk merubah diri dan keluarga yang merupakan ramuan komponen yang mengejawantahkan perilaku seorang wanita. Kerena sangat penting bagi wanita untuk mengenyam pendidikan yang diperlukan, menggagas keterampilan yang dapat mendukungnya ditengah masyarakat dan menempah mentalitasnya

sebagai wanita mandiri dalam menyambut peran strategisnya sebagai istri, ibu, warga masyarakat dan tenaga kerja yang potensial.

b. Faktor eksterna

Selain faktor penghambat dari dalam kelompok SPP, terdapat pula beberapa faktor penghambat dari luar kelompok yaitu, proses pendampingan yang tidak maksimal yang dilakukan oleh pelaku program sepanjang kegiatan SPP ini. Kurang maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan SPP pada kelompok perempuan di kedua desa ini.

Berdasarkan gambaran faktor penghambat internal dan eksternal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pada akhir kegiatan kelompok SPP ini dinilai berhasil berdasarkan evaluasi berupa audit yang menilai pengembalian cicilan kelompok baik, dan berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat adanya pengembangan usaha anggota kelompok akan tetapi beberapa faktor penghambat di antara tentu saja mempengaruhi pencapaian tujuan jangka menengah khususnya pada tujuan ke tiga yaitu penguatan kelembagaan kelompok SPP tidak berhasil.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kegiatan SPP untuk kelompok perempuan di desa Balukhering dan desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan dalam PNPM-MP tidak sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Pelaksanaan pendanaan yang merupakan salah satu strategi pemberdayaan dalam kegiatan SPP untuk perempuan di desa Balukhering dan desa Sinar Hading yang berkaitan dengan tujuan pertama dapat dikatakan berjalan dengan baik pada proses pendanaan. Pada proses pengembalian untuk desa Balukhering tidak berjalan dengan baik karena ditemukan terjadinya kredit macet. Sedangkan di desa Sinar Hading pada proses pengembalian berjalan dengan baik. Pada proses verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi berjalan tidak sesuai dengan ketentuan program. Penilaian terhadap hasil tujuan jangka menengah program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat yaitu tujuan pertama, mempercepat proses pemenuhan pendanaan usaha dan ataupun sosial dasar dapat dinilai berhasil yang ditandai dengan peningkatan hasil usaha anggota kelompok dan memenuhi kebutuhan sosial dasar mereka. Berkaitan dengan tujuan jangka menengah kedua dan ketiga pada pelaksanaan SPP selama kurun waktu empat tahun (2009-2012) proses pendampingan yang dilakukan oleh pelaku baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa kepada kelompok SPP tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penilaian terhadap tujuan jangka menengah kedua yaitu memberikan

kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha pada penelitian ini dinilai berhasil yang ditandai dengan pemenuhan dan kesempatan dan kemudahan anggota kelompok untuk mendapatkan dan demi mengembangkan usaha untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga.

Penilaian terhadap hasil tujuan jangka menengah ketiga yaitu mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tujuan ini tidak tersapai karena kelompok SPP di kedua desa ini tidak mengalami penguatan kelembagaan dan peningkatan dalam pengelolaan simpan pinjam.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Sinar Hading dan desa Balukhering terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan SPP. Faktor pendukung yang berasal dari dalam (faktor internal) yaitu motivasi dan semangat kaum perempuan untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Sedangkan faktor pendukung yang berasal dari luar (faktor eksternal) yaitu sesuai dengan ketentuan program PNPM-MP dimana masyarakat miskin dengan cepat dan mudah mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan tanpa agunan. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan SPP yang berasal dari dalam (faktor internal) yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan/*skill* baik pelaku di tingkat desa maupun pemanfaat yaitu kaum perempuan yang rendah. Sedangkan faktor penghambat yang berasal dari luar (faktor eksternal) adalah kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping dan kurangnya kepercayaan

masyarakat khususnya kaum laki-laki terhadap perempuan untuk usaha ekonomi.

3. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran bagi perbaikan program ke depan yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Terkait dengan pencapaian tujuan jangka menengah kegiatan SPP maka perlu untuk mengoptimalkan proses pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan SPP, maka hal penting yang harus ditekankan adalah Perlu pemahaman akan tugas dan fungsi serta rasa memiliki terhadap kegiatan oleh Fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, KPMD/K atau pihak-pihak yang terlibat dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan. Perlu adanya perbaikan dalam program dengan menambahkan proses pengawasan dalam pelaksanaan pendampingan yang dapat dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan, pemerintah kecamatan, PJOK, pemerintah desa sehingga para pendamping dapat menjalankan tugas pendampingan kepada kelompok SPP dengan maksimal. Pada tahap verifikasi harus dilaksanakan secara serius dan sesuai dengan ketentuan program sehingga tujuan akhir dari kegiatan ini dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat guna kepada calon pemanfaat dari rumah tangga miskin. Salah satu dari tujuan jangka menengah dari kegiatan SPP yaitu penguatan kelembagaan perlu diperhatikan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kelanjutan dari program PNPM MP yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Setiap pelaku PNPM Mandiri Perdesaan seharusnya lebih menyadari tujuan akhir dari program ini, seperti mata rantai yang selalu terhubung antara satu dengan yang lainnya yang menggambarkan

satu kekuatan dan keberlanjutan program. Ke depannya perlu adanya perhatian khusus dari pembuat program khususnya pada kegiatan SPP, perlu adanya perbaikan dalam bentuk evaluasi yang menilai pencapaian tujuan jangka menengah/*objective* dan tujuan jangka panjang/*goal* pada kegiatan SPP ini. Pencapaian tujuan umum dan khusus dari kegiatan SPP harusnya menjadi tujuan penting yang harus dicapai dalam kegiatan, bukan hanya pencapaian berupa pelaksanaan pengembalian dengan baik karena sebagai bagian dari program pemberdayaan diharapkan setelah kegiatan SPP berakhir, masyarakat dapat lebih mandiri dan berdaya dalam menggunakan semua potensi yang dimilikinya.

2. Terhadap berbagai faktor pendukung harus dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku dalam kegiatan sehingga kualitas pemberdayaan terhadap kelompok penerima dana SPP benar-benar optimal. Selanjutnya terhadap faktor-faktor penghambat perlu dibenahi, dengan cara memaksimalkan pelaksanaan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Margaret, & Bowendy. 2003. *Research For Social Workers (An Introductio to Methods 2 Edition)*. Australia: Allen & Unwin.
- Bakhit, Izzedan., Von Ravensburg, Nicole Goler., Munkner, Hans H., Walter, Victoria., & Walter, Thomas. 2001. *Menggempur Akar-akar Kemiskinan*. Jakarta : Yakoma PGI.
- Batubara, Marwan. 2008. *Skandal BLBI; Ramai-ramai Merampok Negara* Jakarata : Haekal Media Center .
- Draha Taliziduhu. 2001. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Jakarta
- Dunn, Willian.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hubeis, Aida Vitayala,S. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa.* Bogor : IPB Press.
- Ife, J.W. 2006. *Community Developmen: Community-beased alternative in an age of globalistion.* (Third Edition). Australia: Pearson Education Australia.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, Lawrence W. 2006. *Social Research Metthods – Qualitative and Qualitative Approaches.*(Sixth Edition) USA: Person Education.inc Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Noerdin, Erdiana., & Agustini., Erni & Pakasi, Diana. T Aripurnami, Sita & Hadijah, Siti Nurwati 2006. *Potret Kemiskinan Perempuan*. Jakarta : Women Research Intitute.
- Nugroho Rian. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Oakley, Peter., & Clayton, Andrew. 2001 *The Monitoring And Evaluation Of Empowerment*.Oxford : Intrac.
- Rukminto Isbandi Adi, 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Subarsono AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta.
- Shaw, Ian F., & Greane, Jennifer C., & Mark, Melvin M. 2006 *The SAGE Henbook of Evaluation*. London : SAGE Publikation Ltd.

Sudarmayanti.. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagain ke Dua, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance..* Bandung : Mandar Maju.

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik – Panduan praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial..* . Bandung : Alfabetha.

----- . 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik- Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia* Bandung : Alfabetha.

Suhartono, Irwan. 2002. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Sunodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteran Bangsa.* Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

The Save The Children Fund. 2006. *Toolkits : A Practical Guide to Planning, Monitoring Evaluation and Impact Assesment.* London The Save The Children Fund.

The World Bank. 2004 . *International Program for Development Evaluation Training: Building Skills to Evaluate Development Intervention.* Netherlands : The World Bank Group arleton University.

Wahab Abdula Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Malang: Universitas Muhamadyah

Winarno Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori Proses dan Studi Kasus,* Yogyakarta : CAPS

Dokumen dan Peraturan Perundangan

UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-keempat 2002).

Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Keputusan Mendagri Nomor. 132 tahun 2003 tentang Alokasi Anggaran Untuk Pengarusutamaan gender.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan No: 25/Kep/Menko/Kesra/ VII/ 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Sumber Lain

Kementrian Kesehatan RI 2010. Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Jakarta : Kementrian Kesehatan RI

Tim Penyusun Pedoman Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender 2010. Pedoman Perencanaan dan Pengannggaran Resposif Gender. Jakarta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Tim Penyusun Pedoman Umum PNPM Mandiri. 2008 Pedoman Umum PNPM Mandiri Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RI 2009. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan 2009. Jakarta: Depaqrtemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

UNIVERSITAS TERBUKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Anggota Kelompok SPP

- I. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam pada kelompok SPP dicermati dari proses pendampingan dan pendanaan yang dilakukan selama periode kegiatan tahun 2009-2012.
- A. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh KPMD/K selama pelaksanaan kegiatan SPP ?
- Pada tahap musyawarah/pertemuan dalam PNPM-Mandiri Perdesaan
 1. Apakah kader memotivasi anggota Kelompok SPP untuk mengikuti pertemuan ?
 2. Apakah kader dapat memandu jalannya pertemuan dengan baik
 3. Apakah kader dapat memandu peserta untuk menyusun peta sosial dengan baik ?
 4. Apakah kader dapat menjelaskan tentang PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik ?
 - Pada tahap Pelaksanaan kegiatan SPP
 5. Bagaimana pendampingan yang dilakukan kader pada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana ?
 6. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai nara sumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM-MP, kegiatan SPP dan yang terkait?
 7. Apakah kader melaksanakan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu kepada anggota/kelompok SPP ?
 8. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai mediator ?
 9. Apakah kader menjalankan fungsinya sebagai penggerak ?
 10. Bagaimana kemampuan kader dalam berkomunikasi ?
- B. Bagaimana dengan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal selama kegiatan SPP ?
- a. Pada kegiatan musyawarah PNPM-MP
 11. Apakah pendamping aktif terlibat membantu fasilitator dan kader mendampingi anggota kelompok SPP dalam musyawarah PNPM-MP ?
 - b. Pada pelaksanaan kegiatan SPP
 12. Bagaimana pendampingan yang dilakukan pendamping kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana ?
 13. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai nara sumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM-MP, kegiatan SPP dan yang terkait ?

14. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu pada anggota/kelompok SPP ?
 15. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai mediator ?
 16. Apakah pendamping menjalankan fungsinya sebagai penggerak ?
 17. Bagaimana kemampuan pendamping dalam berkomunikasi ?
- C. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan selama pelaksanaan kegiatan SPP?
- a. Pada tahap sosialisasi dan penyebaran informasi PNPM-MP
 18. Apakah anggota dan memahami penjelasan fasilitator tentang kondisi umum, kondisi sosial ekonomi dan masalah yang ada di lingkungannya ?
 19. Apakah anggota kelompok memahami penjelasan fasilitator tentang PNPM-MP ?
 - b. Fasilitasi dalam pertemuan masyarakat
 20. Apakah fasilitator dapat memandu jalannya pertemuan ?
 21. Apakah fasilitator dapat memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapatnya ?
 22. Apakah fasilitator dapat memandu masyarakat dalam pengambilan keputusan ?
 - c. Pelaksanaan kegiatan SPP
 23. Bagaimana pendampingan yang dilakukan fasilitator kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana dan pengelolaan dana ?
 24. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai nara sumber yaitu dapat memberikan informasi tentang PNPM-MP, kegiatan SPP dan yang terkait ?
 25. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai pelatih jika diperlukan untuk melatih keterampilan tertentu bagi anggota kelompok SPP ?
 26. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai mediator ?
 27. Apakah fasilitator menjalankan fungsinya sebagai penggerak ?
 28. Bagaimana kemampuan fasilitator dalam berkomunikasi ?
- II. Tentang hasil sesuai dengan tujuan jangka menengah dari kegiatan SPP yang dilaksanakan.
- A. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ekonomi ataupun sosial dasar
 1. Apakah pinjaman dana yang diterima dapat memenuhi kebutuhan modal usaha ?
 2. Apakah pinjaman dana dapat memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan anak dan kesehatan keluarga ?
 - B. Memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha

3. Apakah anggota kelompok SPP mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam mendapatkan modal usaha dan mendapatkan kemudahan dalam administrasi untuk mendapatkan modal tersebut ?
- C. Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam pada Kelompok SPP
4. Apakah terjadi peningkatan dalam pelayanan simpan pinjam pada Kelompok SPP ?
 5. Apakah Kelompok SPP mengalami penguatan dalam kelembagaan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA
Pendamping Lokal Kecamatan Lewolema

Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal selama pelaksanaan kegiatan SPP pada tahap :

- a. Tahap Musyawarah dalam PNPM-MP
 1. Bagaimana pendamping aktif terlibat membantu fasilitator dan kader mendampingi anggota kelompok SPP dalam pertemuan/musyawarah PNPM-MP ?
 2. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada tahapan musyawarah ?
- b. Pada pelaksanaan kegiatan SPP
 3. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana ?
 4. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pengelolaan dana ?
 5. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pelaksanaan kegiatan SPP ?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Fasilitator Kecamatan Lewolema

Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator kecamatan selama pelaksanaan kegiatan SPP pada tahap :

- a. Fasilitasi pertemuan/Musyawaharah masyarakat
 1. Bagaimana fasilitator mendampingi anggota kelompok SPP dalam pertemuan/ musyawarah PNPM-MP ?
 2. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pendampingan pada tahapan musyawarah ?
- b. Pada pelaksanaan kegiatan SPP
 3. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pencairan dana ?
 4. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pengelolaan dana ?
 5. Bagaimana pendampingan kepada anggota kelompok SPP dalam proses pelaksanaan kegiatan SPP ?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sinarhading

1. Bagaimana pendapat (bapak/i) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Sinar Hading ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Sinarhading
3. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Sinarhading dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM-MP di Desa Sinarhading ?
5. Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Sinarhading?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Balukhering

1. Bagaimana pendapat (bapak/i) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Balukhering ?
3. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Balukhering dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM-MP di Desa Balukhering ?
5. Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Lewolema

1. Bagaimana pendapat (bapak/i) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Lewolema khususnya di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
3. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM-MP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading?
5. Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Pemerintah desa (Kepala Desa) Sinarhading

1. Bagaimana pendapat (bapak) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Sinar Hading ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Sinarhading
3. Bagaimana Pendapat (bapak) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Sinarhading dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM-MP di Desa Sinarhading ?
5. Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Sinarhading?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Aparat Pemerintah desa (Kepala Desa) Desa Balukhering

- 1 Bagaimana pendapat (bapak) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering ?
- 2 Bagaimana Pendapat (bapak) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Balukhering ?
- 3 Bagaimana Pendapat (bapak) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Balukhering dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
- 4 Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNPM-MP di Desa Balukhering ?
- 5 Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) Lewolema

1. Bagaimana pendapat (bapak/i) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Lewolema khususnya di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
3. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNM-MP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading?
5. Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Fasilitator Kecamatan Lewolema

1. Bagaimana pendapat (bapak/i) tentang pelaksanaan kegiatan SPP di Kecamatan Lewolema khususnya di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
2. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang proses pengembalian dana oleh kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading ?
3. Bagaimana Pendapat (bapak/i) tentang partisipasi anggota kelompok SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading dalam setiap pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan ?
4. Apa kesulitan yang dihadapi dalam pengelolaan PNM-MP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading?
Sebutkan dan jelaskan Faktor pendukung dan penghambat apa saja dalam pelaksanaan kegiatan SPP di Desa Balukhering dan Desa Sinarhading

UNIVERSITAS TERBUKA



UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Kupang

Jl. Pulau Indah No. 6, Oesapa Barat, Kupang 85228

Telepon: 0380-8553825, Faksimile: 0380-8553813

Laman: ut-kupang@ut.ac.id

Nomor : 1805/UN31.42/LL/2013
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Ijin untuk Melakukan Penelitian**

Yth. Camat Lewolema
Kabupaten Flores Timur

Kami sampaikan permohonan ijin penelitian untuk penyusunan tesis mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka an. Yohanes Ibi Hurint/018397393 dengan judul penelitian **Evaluasi Implementasi Kebijakan PNPM-MP di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinas Gading dan Desa Balukhering)**. Kiranya dapat diberikan ijin penelitian di wilayah kabupaten Flores Timur.

Demikian untuk maklum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LEWOLEMA
KAWALIWU**

SURAT REKOMENDASI UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN

NOMOR :KEC.LL.070/167/Kesos-yanum/2013

MEMBACA : Surat Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Kupang Nomor : 1505/UN31.42/LL/2013 tanggal 16 Mei 2013, Perihal Mohon Ijin Untuk Melakukan Penelitian.

MENINGGAT : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri, Nomor : 070/2170, Tanggal 05 Juli 1972
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 070/2170 Tanggal 10 Juni 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian.

MENERANGKAN :**TIDAK BERKEBERATAN**.....

Kepada:

Nama : YOHANES IBI HURINT, S.Sos.

NIM : 018397393

Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian

Judul : “Evaluasi Implementasi Kebijakan PNPM-MP di Kecamatan Lewolema (Studi Kasus Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan di Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering).”

Lokasi Penelitian : Desa Sinar Hading dan Desa Balukhering, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur

Lama Penelitian : 1 (satu) bulan

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat.
2. Selama mengadakan Penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan dibidang lain.
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal – hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan hasil penelitian Kepada Bupati Flores Timur.
5. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan diminta agar INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan/fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPORDA)
Jl. Veteran No. 10, Kecamatan Telo, Kabupaten Flores Timur, NTT
TARUVA K. S. A. I.

9710111
KABUPATEN FLORES TIMUR
KAWAH RABU
KAWAH RABU
KAWAH RABU

1. Kawasan	2. Desa	3. Desa	4. Desa	5. Desa	6. Desa	7. Desa	8. Desa	9. Desa	10. Desa	11. Desa	12. Desa	13. Desa	14. Desa	15. Desa	16. Desa	17. Desa	18. Desa	19. Desa	20. Desa
------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

INTILAKS PETA

SIKILUR PETA	No. 1
BAKUM PETA	No. 2
SKALA 1:10000	B



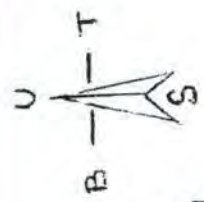
ALOKASI DAERAH
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ITS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

UNIVERSITAS TERBUKA

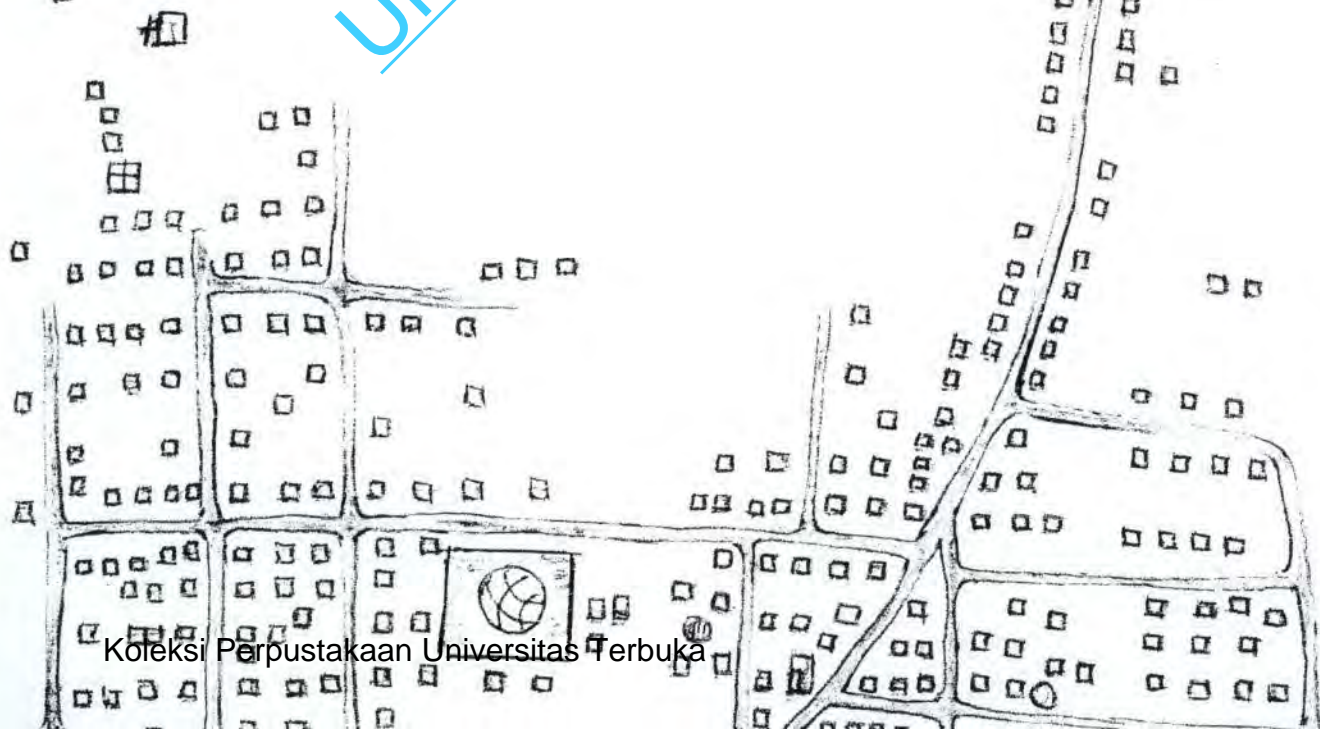


SKETSA DESA SINAR HADING

41602



- KORKE
- KANTOR KECAMATAN LEWU LEMA
- GEKETA
- GEDUNG SEKOLAH DASAR
- KANTOR DESA
- POSYANDU
- RUMAH MASYARAKAT
- BAK AIR KINYAM
- PASAR BELUBAKE
- SUMUR
- LAPANGAN BOLA



UNIVERSITAS TERBUKA

PETA

DESA BALUKHERIN

LEGENDA

Permanen	Permanen
Semi Permanen	Semi Permanen
Darurat	Darurat
SMP Batu Payung	SMP Batu Payung
SDK/SDI	SDK/SDI
Kantor Desa	Kantor Desa
Gedung Serba Gu	Gedung Serba Gu
Rumah Adat (Kok)	Rumah Adat (Kok)
Polindes	Polindes
Posyandu	Posyandu
TKK Tonuwujo	TKK Tonuwujo
Gereja	Gereja
Biara SSpS	Biara SSpS
Poliklinik	Poliklinik
Pastoran	Pastoran
Bak Air Minum Bers	Bak Air Minum Bers
Lapangan Bola Kai	Lapangan Bola Kai
Balai Peremuan	Balai Peremuan
Kali Matl	Kali Matl
Jalan Semenisasi	Jalan Semenisasi
Belum Semenisasi	Belum Semenisasi

41602



